

**BUDAYA DEMOKRASI PADA MASYARAKAT PLURAL  
(SUATU STUDI DESKRIPTIF DI WILAYAH PONDOK BENDA  
KELURAHAN JATIRASA KECAMATAN JATIASIH)**

**RIZKY AGUSETIAWAN  
4115051871**



**Skripsi Yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam  
Mendapatkan Gelar Sarjana Kependidikan**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

**RIZKY AGUSETIAWAN**, NIM 4115051871 *Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Suatu Studi Deskriptif Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih*. Skripsi, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pemahaman masyarakat Pondok Benda tentang Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dari Bulan November 2010 sampai dengan Bulan Februari 2011.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang *Informan* yang terdiri dari ; Tokoh Masyarakat, Suku Betawi, Etnik Tionghoa, Suku Jawa, Suku Sunda, Tokoh Agama Kristen, Suku Batak, Tokoh Agama Islam dan Tokoh Kepemudaan. Sedangkan untuk **Key Informan** adalah Bapak H. Sujito selaku Lurah Jatirasa yang bertugas di sekitar Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini dapat membangun budaya demokrasi pada masyarakat plural dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari patokan atau indikator dalam suatu budaya demokrasi pada masyarakat plural yang di tunjukkan adanya gejala-gejala kehidupan demokrasi yang dapat dilihat dari sikap dan pola perilaku masyarakat.

Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyelesaikan persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat

memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


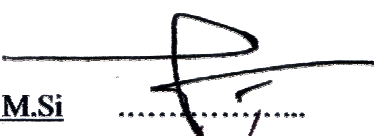



Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu sosial

Universitas Negeri Jakarta

  
Drs. Komarudin, M.Si

Nip : 196403011991031001

### TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Raharjo, S.Pd., M.Si.</u> Ketua	 .....	<u>20-07-2011</u> .....
2.	<u>Yuyus Kardiman, S.Pd., M.Si</u> Sekretaris	 .....	<u>12-07-2011</u> .....
3.	<u>Dra. Wuri Handayani, M.Si.</u> Pembimbing I (Anggota)	 .....	<u>20-07-2011</u> .....
4.	<u>Drs. Suhadi, M.Si.</u> Pembimbing II (Anggota)	 .....	<u>12-07-2011</u> .....
5.	<u>Dra. Herawati.</u> Penguji Ahli (Anggota)	 .....	<u>12-07-2011</u> .....

Tanggal Lulus : 25 Juli 2011.

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizky Agusetiawan.

No. Registrasi : 4115051871

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juli 2011.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Agusetiawan.  
No. Registrasi : 4115051871.  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
Jurusan / Fakultas : Ilmu Sosial Politik.  
Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas Skripsi saya yang berjudul :

*“ Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural (Suatu Studi Deskriptif Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih) ”.*

Beserta perangkat yang ada (*jika diperlukan*). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta.

Pada Tanggal : 25 Juli 2011

Yang Menyatakan



Rizky Agusetiawan

## MOTTO HIDUP

*Sebuah sukses tidak turun begitu saja dari langit atau datang begitu saja. Dan juga bukan sebagai warisan atau pemberian semata. Sebuah sukses harus diupayakan dengan kesungguhan dan kerja keras yang disertai kejujuran, itikad dan niat baik serta kemauan dan iman yang kuat.*

*Karya ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta ;*

- 1. Bapak, Ibu, dan Adik yang tak henti-hentinya mendo'akan dan senantiasa memberikan semangat.*
- 2. Tante dan Omku yang telah memberi dorongan baik moril maupun materil, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan yang lebih Baik, Amiin.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak. Drs. Komarudin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak. Drs. H. Sarkadi, M.Si., selaku Pembimbing Akademis sekaligus Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Etin Solihatin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta.
4. Bapak Raharjo, S.Pd, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta.
5. Ibu Dra. Wuri, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya kepada penulis.



6. Bapak Drs. Suhadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan bimbingannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan rekan-rekan Mahasiswa di Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah dengan ikhlas membagi ilmu kepada peneliti serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak Camat Jatiasih, Bapak Lurah Jatirasa, Tokoh Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan warga di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Bapak, Ibu, Adik, Tante, dan Omku yang telah memberikan doanya serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jakarta, Juli 2011

Penulis,

Rizky Agusetiawan  
4115051871

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK</b> .....	v
<b>MOTTO HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Hakikat Budaya Demokrasi .....	12
1. Unsur Utama Demokrasi .....	23
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	23
3. Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi .....	26
4. Topologi Budaya Politik .....	31
B. Hakikat Masyarakat Plural .....	32
1. Pengertian Masyarakat .....	32
2. Kemajemukan Masyarakat Indonesia .....	37
3. Kemajemukan Dalam Hal Ras .....	39

4. Kemajemukan Dalam Hal Suku Bangsa .....	40
5. Kemajemukan Dalam Hal Agama .....	47
6. Integrasi dan Konsolidasi Warga Masyarakat Dalam Kelompok Sosial .....	48
7. Sarana-Sarana Pergaulan .....	55
8. Primordialisme, Etnosentrisme, Dan Berkembangnya Politik Aliran .....	59
9. Pengaruh Kemajemukan Masyarakat Indonesia .....	62
10. Pengertian Masyarakat Plural .....	66

### **BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....	72
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	72
C. Metode penelitian .....	73
D. Alat Pengumpulan Data .....	73
E. Teknik Kaliberasi Data .....	74
F. Teknik Analisis Data .....	75

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data .....	77
I. Karakteristik Masyarakat Pondok Benda.....	77
II. Karakteristik Wilayah Kelurahan Jatirasa.....	82
B. Temuan Penelitian .....	88
C. Pembahasan .....	94

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>169</b>
-----------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih .....	85
Tabel 1.2	Berdasarkan Kelompok Umur .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Catatan Lapangan .....	106
Lampiran 2	Pedoman Wawancara .....	112
Lampiran 2.1	Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pondok- Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih .....	113
Lampiran 2.2	Wawancara Dengan Suku Betawi .....	119
Lampiran 2.3	Wawancara Dengan Etnik Tionghoa .....	123
Lampiran 2.4	Wawancara Dengan Suku Jawa .....	128
Lampiran 2.5	Wawancara Dengan Suku Sunda .....	132
Lampiran 2.6	Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen .....	135
Lampiran 2.7	Wawancara Dengan Suku Batak .....	142
Lampiran 2.8	Wawancara Dengan Lurah Jatirasa .....	145
Lampiran 2.9	Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam .....	152
Lampiran 2.10	Wawancara Dengan Tokoh Kepemudaan .....	155
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian .....	160
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Penelitian .....	161
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	162
Lampiran 6	Peta Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa- Kecamatan Jatiasih .....	163
Lampiran 7	Dokumentasi .....	164

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri memiliki pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yaitu : “ *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar* ”. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut mulai awal kemerdekaan Indonesia hingga reformasi.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. *Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu* adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dalam pandangan **Robert A. Dahl** dalam Bukunya Komarudin Hidayat terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra; *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga; Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; ICCE UIN JAKARTA ; 2008(hal.52)

Namun demikian, demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-prinsip di atas juga mempunyai parameternya. Sebagai ukuran apakah suatu Negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya, sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokratis itu berjalan dalam suatu Negara. Ketiga aspek tersebut *adalah*<sup>2</sup>;

- 1). *Pemilihan Umum* sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi sebagai instrument paling dalam proses pergantian pemerintahan.
- 2). *Susunan kekuasaan Negara*, yakni kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
- 3). *Kontrol rakyat*, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara sistematis, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Menurut **Ahmad Syafi'i Ma'arif**, demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi. Menurutnya, demokrasi adalah proses dimana masyarakat dan Negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang

---

<sup>2</sup> Ibid Hal. 52

dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>.

Dari sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya perilaku tidak demokratis pada warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang, pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol primordial (*suku dan agama*) dan berpolitik.

Proses demokratisasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang (*money politics*), pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol primordial (*suku dan agama*) dan berpolitik<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra; *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga ; Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; ICCE UIN JAKARTA ; 2008(hal.13)

<sup>4</sup> Ibid. hal.13.



*Budaya demokrasi* adalah sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga Negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti menyelesaikan* persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai.<sup>5</sup>

Dengan adanya perilaku-perilaku di atas, maka suatu budaya demokrasi pada masyarakat plural di suatu lingkungan masyarakat tidak luput dari peranan pemerintah setempat serta dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini ditemukan juga di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Selain itu budaya demokrasi pada suatu masyarakat plural di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan budaya demokrasi pada masyarakat plural di dalam suatu kehidupannya sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Muhammad Hikam., 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan ke-2, Jakarta; LP3ES. Hal, 20.

Dalam hal ini yang terjadi di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih yang peneliti lihat dari hasil observasi yang kami lakukan adalah <sup>6</sup>:

Dilihat dari segi budaya demokrasi pada masyarakat plural di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini dalam hal *menyelesaikan persoalan melalui musyawarah*, namun terkadang ada juga suatu persoalan tidak di bawa dalam suatu wadah musyawarah. Dari sisi *perbedaan pendapat* kadang sering terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam suatu forum rapat tetapi dalam forum rapat selanjutnya bisa diatasi.

Sementara itu dari sisi *partisipasi masyarakat dalam pemerintah* misalkan saja dalam hal pemilihan Ketua RT/RW masyarakat sudah berpartisipasi, namun di satu sisi lain ada saja warga yang tidak berpartisipasi sama sekali.

Dalam hal *menumbuhkan semangat berdemokrasi* untuk masyarakat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini masih sangat kurang terutama adanya sosialisasi dari pemerintah setempat namun untuk saat-saat ini sudah mulai ada peningkatan dari peran pemerintah setempat dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi kepada warganya.

---

<sup>6</sup> Observasi awal penelitian Bulan Jului 2010

Dari sisi ketaatan terhadap *peraturan yang berlaku*, untuk hal ini tentu ada yang taat dan tidak taat dalam mentaati peraturan yang berlaku misalkan saja dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan dari segi *menghormati terhadap pelaksanaan HAM*, untuk hal ini tahun-tahun sebelumnya pernah sempat terjadi konflik antar umat beragama namun untuk saat-saat ini tidak pernah terjadi.

Dalam hal *hidup berdampingan secara damai*, untuk hal ini masih belum hidup berdampingan secara damai seutuhnya kadang pernah terjadi keributan-keributan kecil antar kelompok namun pada saat ini sudah bisa di atasi secara sepenuhnya serta adanya kesadaran dari dalam masyarakat itu sendiri.

Dari gambaran diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang budaya demokrasi pada masyarakat plural yang terjadi di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

**B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Adakah Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih?
2. Sejauh mana metode Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih?
3. Bagaimana Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih?
4. Seberapa besar tingkat Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih?
5. Sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih?

### **C. Pembatasan Masalah.**

Dari berbagai masalah yang dapat diidentifikasi tersebut tidak semuanya penulis selesaikan karena keterbatasan waktu, energi, dan biaya, maka penelitian ini di batasi pada permasalahan “ Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih “.

Budaya demokrasi pada masyarakat plural yang di maksud adalah ingin melihat bagaimana budaya demokrasi pada masyarakat plural dari suatu sikap dan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, *seperti* : menyelesaikan suatu persoalan melalui musyawarah, menghormati berbagai pendapat yang ada serta memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), serta hidup berdampingan secara damai.

Lokasi penelitian di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

#### **D. Perumusan Masalah.**

Dari masalah yang diidentifikasi serta dari pembatasan masalah diatas, maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan mengenai :

*“ Bagaimana Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih “.*

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ;

##### **1. Ilmu Pengetahuan.**

Sebagai resensi ilmiah mengenai penerapan Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat di tunjukkan dengan adanya gejala-gejala kehidupan demokrasi yang dilihat dari sikap dan pola perilaku masyarakat. Sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga Negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti* menyelesaikan persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat

memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai.

## **2. Pemerintah Setempat.**

Membantu pemerintah dalam memahami dan menyikapi Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural yang terdapat di lingkungannya yaitu dengan Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti* menyelesaikan persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai sehingga dapat tercipta suatu Kesatuan dan Persatuan Bangsa.

### **3. Masyarakat.**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih yang di jadikan sebagai tempat penelitian pada khususnya dan pada umumnya bagi masyarakat lain yang memiliki masalah terhadap Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural serta membantu memotivasi masyarakat dalam menjalankan Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural yang ada di lingkungannya.

### **4. Pembaca.**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca agar dapat memperluas wawasan berpikir, dan termotivasi dalam mengatasi Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural yang terdapat di Negara tercinta ini.

### **5. Penulis.**

Sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Hakikat Budaya Demokrasi.

Budaya berasal dari kata *budhi* dan *daya* yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan kata *kebudayaan*, sedangkan dari bahasa sansekerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal.<sup>6</sup>

Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda di istilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa Inggris, kata *budaya* berasal dari kata *culture*. Sedangkan dalam bahasa latin berasal dari kata *colera*.

*Colera* diartikan dengan mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (*bertani*). Kemudian, pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.<sup>7</sup>

Budaya adalah Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar ( *Koentjaraningrat : 1979* ).<sup>8</sup>

Definisi lain dari budaya adalah keadaan, kebudayaan, hasil dan karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Berdasarkan pengertian diatas budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia yang berupa hasil cipta dan karya

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 1990, Hal. 181.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 182.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 179.

Manusia yang mengalami perubahan dan menerima peninggalan budaya dari generasi sebelumnya.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *demokrasi* diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.<sup>10</sup>

Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil (*civil society*) baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat dengan Negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak.

Secara etimologis “ *demokrasi* ” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *democratos* (*demokrasi*) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian demokrasi secara *terminologi* adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli tentang demokrasi : **(a) Joseph A. Schmeter** mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat ;

---

<sup>9</sup> Ibid. hal 18

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta:Balai Pustaka 1995 (hal 883-897).

<sup>11</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra; Pendidikan *Kewarganegaraan Edisi Ketiga* ; *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; ICCE UIN JAKARTA ; 2008 (hal. 40)

(b) **Sidney Hook** berpendapat *Demokrasi* adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa ; (c) **Philippe C. Schmitter** menyatakan, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih ; dan (d) **Henry B. Mayo** menyatakan, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal ; pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Tiga

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 39

faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Ketiganya dapat di jelaskan sebagai berikut;<sup>13</sup>

*Pertama*, pemerintahan dari rakyat ( *government of the people* ) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program – programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

*Kedua*, pemerintahan oleh rakyat ( *government by the people* ) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat ( *social control* ). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara Negara dapat dihindari.

---

<sup>13</sup> Ibid., hal. 40

*Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat ( *government for the people* ) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan social dan lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antarwarga Negara dan antara warga negara dengan Negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Demokrasi dikembangkan dengan tujuan menampung aspirasi yang terdapat dalam masyarakat dan melindungi hak-hak rakyat dimana hal itu menjadi budaya demokrasi yang bersifat universal. Demokrasi telah menjadi suatu sistem pemerintahan yang paling populer. Hampir semua Negara menyatakan pemerintahannya berdasarkan demokrasi. Sama halnya di Indonesia, sejak masa kemerdekaan sampai sekarang, demokrasi telah menjadi standar cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid hal.39

<sup>15</sup> Ibid Hal 16.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya demokrasi bersumber dari suatu pola pikir sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Artinya, keinginan, aspirasi, atau pendapat individu harus dihargai.
2. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
3. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dihasilkan akan berakibat terhadap dirinya.
4. Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan timbul permasalahan antarindividu sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana paham yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Bagaimana paham ini memandang hubungan antara individu dan masyarakat, akan menentukan cara untuk mengatasi masalah, pendapat, dan kepentingan masyarakat.

Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut cendekiawan muslim **Nurcholish Madjid**, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan – bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis

---

<sup>16</sup> Ibid Hal. 16

maupun pengalaman praktis di Negara – Negara yang demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah;<sup>17</sup>

**Pertama**, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajuan tidak sekedar mengakui pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga Negara dan Negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.

Jika norma ini dijalankan secara konsekuen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Dalam konteks Indonesia, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

**Kedua**, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga Negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi – kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam

---

<sup>17</sup> Ibid hal. 39

setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya “ *partia functioning of ideals* ”; yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan secara sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk – bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

**Ketiga**, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur – prosedur demokrasi ( *pemilu, suksesi, kepemimpinan, dan aturan mainnya* ), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur – unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.

**Keempat**, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan



semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga Negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah seperti telah dikemukakan diatas. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing - masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain.

**Kelima**, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani ( *freedom of conscience* ), persamaan hak dan kewajiban bagi semua ( *egalitarianism* ) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad baik orang dan kelompok orang lain ( *trust attitude* ). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak – pihak yang berbeda.

**Keenam**, trial and error ( *percobaan dan salah* ) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi

membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Untuk meminimalkan unsur-unsur negatif demokrasi, partisipasi warga Negara mutlak dibutuhkan. Sebagai Negara yang masih minim pengalaman berdemokrasinya, Indonesian masih membutuhkan percobaan – percobaan dan “ *jatuh bangun* ” dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses – proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.<sup>18</sup>

*Budaya demokrasi* adalah sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga Negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti menyelesaikan* persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang

---

<sup>18</sup> Ibid hal. 43

berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai (Muhammad Hikam : 1999).<sup>19</sup>

Untuk merealisasikan budaya demokrasi tersebut, masyarakat Indonesia harus dapat membudidayakan perilaku - perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, adapun perilaku-perilaku tersebut *yaitu*,<sup>20</sup>

- Menumbuhkan sikap terbuka..
- Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah.
- Menghargai pendapat orang lain.
- Mau belajar menerima keberagaman.

Suatu demokrasi yang sehat bergantung terutama pada pembangunan suatu budaya warga Negara yang demokratis. Menurut **Diane Ravitech**, budaya dalam pengertian disini merujuk pada perilaku, praktik, dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk merubah diri sendiri. Suatu sistem politik totaliter mendorong budaya pasif dan apatis. Budaya warga Negara suatu masyarakat demokratis dibentuk oleh aktivitas yang dipilih secara bebas oleh individu atau kelompok. Warga Negara suatu masyarakat bebas mengajar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Hkam., 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan ke-2, Jakarta; LP3ES. hal, 20.

<sup>20</sup> Ibid. hal 25

<sup>21</sup> Ibid. hal.26.

**1. Unsur utama dari demokrasi adalah<sup>22</sup> ;**

- a. Adanya persamaan hak dan kewajiban seorang dalam sistem pemerintahan.
- b. Adanya kebijakan dilandasi dari prinsip dari bawah ke pucuk pimpinan.
- c. Adanya partisipasi aktif sebuah komponen masyarakat.
- d. Berakhirnya prinsip musyawarah dan akuntabilitas publik.
- e. Kedaulatan Negara berada ditangan rakyat.

**2. Prinsip - Prinsip Demokrasi**

Menurut **Masykuri Abdul dan Dede Rosyada**, prinsip-prinsip demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Selanjutnya **Robert Dahl** dalam tulisannya mengatakan ada beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu<sup>23</sup>;

- a. Kontrol atas keputusan pemerintah.
- b. Pemerintahan yang adil dan jujur.
- c. Hak dipilih dan memilih.
- d. Kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa ada ancaman.
- e. Kebebasan untuk mengakses informasi.
- f. Kebebasan berserikat.

---

<sup>22</sup> Ibid. hal. 26.

<sup>23</sup> Ibid. hal. 27

Tiga nilai utama yang menjadi prinsip eksistensial yang melandasi terbentuknya teori demokrasi, yaitu<sup>24</sup>;

1. Kebebasan.
2. Kesamaan.
3. Kedaulatan suatu mayoritas (*rakyat*).

Syarat - syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis adalah<sup>25</sup>;

1. Perlindungan Konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak.
4. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Menurut **Hendry B. Mayo** mencatat ada sembilan nilai yang mendasari demokrasi, yaitu<sup>26</sup>;

- Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela.
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai, dan terbuka, artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, atau tirani minoritas.

---

<sup>24</sup> Ibid. 28.

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta ;Gramedia 1998 ; hal. 60 )

<sup>26</sup> Ibid, hal. 62

- Membatasi pembaharuan kekuasaan secara minimum.
- Adanya keanekaragaman (*plurality*).
- Tercapainya keadilan.
- Memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Kebebasan.
- Adanya nilai-nilai yang dihasilkan kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Karakter atau jiwa yang demokratis adalah (*Muhammad Hikam;1999*)<sup>27</sup>;

1. Rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warga Negara terutama dalam konteks adanya pluraritas. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, keyakinan agama, dan idiologi politik.
2. Bersikap kritis dan bersikap membuka diri untuk dialog dan diskusi.
3. Bersikap terbuka.
4. Rasional yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional.
5. Adil adalah menempatkan sesuatu secara proposional.
6. Adanya kejujuran.

---

<sup>27</sup> Muhammad Hikam, 1999. *Demokrasi dan Civil Society, cetakan ke-2*, Jakarta; LP3ES. Hal. 30

### 3. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Tegaknya suatu demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain (Komarudin Hidayat:2008)<sup>28</sup> :

#### a. Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law*)

Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law*) memiliki pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara garis besar Negara hukum adalah sebuah Negara dengan gabungan kedua konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1). Adanya perlindungan HAM; 2). Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM; (3). Adanya Pemerintahan berdasarkan peraturan; (4). Adanya peradilan administrasi. Sedangkan, *the rule of law* dicirikan adanya: (1). Supremasi aturan-aturan hukum, (2). Kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*); (3) jaminan perlindungan HAM.

---

<sup>28</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra; *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga ; Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; ICCE UIN JAKARTA ; 2008 (hal. 43).

Istilah Negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi : “ *Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)* ”. penjelasan tersebut sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan Negara Indonesia.<sup>29</sup>

#### **b. Masyarakat Madani (*Civil Society*)**

Masyarakat madani atau *civil society* adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan Negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah.

Masyarakat madani (*civil society*) mensyaratkan adanya keterlibatan warga Negara (*civic engagement*) melalui asosiasi-asosiasi sosial. Keterlibatan warga Negara memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antar-individu dan kelompok yang berbeda. Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik demokrasi.

Perwujudan masyarakat madani secara konkret dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi di luar negara (*non-government organization*)

---

<sup>29</sup> Ibid. hal. 43



atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam praktiknya, masyarakat madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga Negara maupun melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat madani (*civil society*) sebagaimana Negara menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Dalam peran demokrasinya, masyarakat madani dapat tumpuan sebagai komponen penyeimbang kekuatan Negara yang memiliki kecenderungan koruptif.

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1) Wilayah Publik Yang Bebas (*free public sphere*)

Wilayah publik adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan diluar *civil society*. Mengacu pada **Arendt** dan **Habermas**, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas dimana semua warga Negara

---

<sup>30</sup> Ibid. hal. 202

memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Sebagai persyaratan mutlak lahirnya *civil society* yang sesungguhnya, ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu Negara dapat menjadi suasana tidak bebas dimana Negara mengontrol warga Negara dalam menyalurkan pandangan sosial politiknya.

## 2) Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni (*genuine*). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat.

## 3) Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain, toleransi, mengacu pandangan **Nurcholis Madjid**, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama. Senada dengan Madjid, Azra

menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan kehidupan yang berkualitas dan berkeadaban (*tamaddun/civility*), masyarakat madani (*civil society*) mengajarkan sikap-sikap toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik dikalangan warga bangsa.

#### 4) Kemajemukan (*pluralisme*)

Kemajukan atau *pluralisme* merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

Menurut **Nurcholis Madjid**, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).<sup>31</sup>

Kemajemukan dalam pandangan **Madjid** erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian (*toleran*) kepada orang lain, yang nyata-nyata

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal 204.

diperlukan dalam masyarakat yang majemuk. Secara teologis, kemajemukan sosial merupakan dekrit Allah untuk umat manusia.<sup>32</sup>

5) Keadilan sosial (*social justice*).

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan; ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan penertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu (Komarudin : 2008).<sup>33</sup>

#### **4. Topologi Budaya Politik.**

Demi terciptanya suatu demokrasi maka perlu diperhatikan beberapa tipe-tipe budaya politik, *yaitu*<sup>34</sup> ;

1) Budaya Politik Parokial.

Suatu budaya politik yang murni terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem tradisional yang lebih sederhana dengan tingkat spesialisasi politik yang minim, sehingga belum dikatakan demokrasi.

---

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 204.

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 204

<sup>34</sup> Komarudin, Buku *Materi Ajar Sosiologi Politik*, Fakultas Ilmu Sosial ; Universitas Negeri Jakarta ; 2007 (hal.128)

## 2) Budaya Politik Subjek.

Suatu budaya politik terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan objek-objek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input dan pribadi sebagai partisipan yang aktif (*aktor politik*). Budaya politik ini sudah menjalankan demokrasi tetapi sangat dipengaruhi oleh pemimpin.

## 3) Budaya politik Partisipan.

Budaya politik partisipan adalah satu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem keseluruhan, struktur dan proses demokrasi. Dengan kata lain, tipe budaya politik ini ditandai oleh anggota masyarakat atau warga negara yang memiliki pengetahuan dan kesadaran politik, perhatian dan kepedulian terhadap keseluruhan objek-objek politik yang sangat tinggi sehingga budaya ini sudah bagus dalam menjalankan suatu demokrasi.

## **B. Hakikat Masyarakat Plural**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Menurut **Selo Soemardjan** menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Pada dasarnya masyarakat mencakup beberapa unsur, *yaitu*<sup>35</sup> ;

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; Rajawali Pers. Hal. 20

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpunya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, maka suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, oleh karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun disamping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang

harus dipenuhi, agar masyarakat itu dapat hidup terus. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah, antara lain, *sebagai berikut*<sup>36</sup> :

- a. Adanya populasi.
- b. Informasi.
- c. Energi.
- d. Materi.
- e. Sistem komunikasi.
- f. Sistem produksi.
- g. Sistem distribusi.
- h. Sistem organisasi sosial.
- i. Sistem pengendalian sosial.
- j. Perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau plural, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tesebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini, menunjukkan suatu kenyataan bahwa masyarakat indonesia memiliki diferensi sosial diantara anggota-anggota masyarakatnya. Diferensi sosial memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan stratifikasi atau pelapisan sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid. Hal. 22

<sup>37</sup> Ibid. Hal. 107

Konsepsi masyarakat majemuk menurut **J. S. Furnival** (1967) yaitu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural dan ekonomik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain.<sup>38</sup>

Menurut konfigurasi dari komunitas etniknya, masyarakat majemuk dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu<sup>39</sup> :

- a. Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang
- b. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan.
- c. Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan.
- d. Masyarakat majemuk dengan fragmentasi.

Masyarakat majemuk pada *kategori pertama* merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang lebih kurang mempunyai kekuatan kompetitif seimbang. Koalisi lintas etnik sangat diperlukan untuk pembentukan suatu pemerintahan yang stabil.<sup>60</sup>

Masyarakat majemuk pada *kategori kedua* dan ketiga merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas etnik yang kekuatan kompetitifnya tidak seimbang, salah satu kelompok etnik tertentu memiliki kekuatan kompetitif yang lebih besar terhadap kelompok lain. Pada masyarakat majemuk kategori kedua, suatu kelompok etnik mayoritas mendominasi kompetisi politik atau atau ekonomi sehingga posisi kelompok-

---

<sup>38</sup> Ibid. hal. 108

<sup>39</sup> Ibid. hal. 108



kelompok yang lain kecil. Pada masyarakat majemuk kategori ketiga, suatu kelompok etnik minoritas tertentu mempunyai keunggulan kompetitif yang kuat sehingga mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat.<sup>40</sup>

Masyarakat majemuk pada *kategori keempat* merupakan masyarakat yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik, semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Masyarakat demikian ini biasanya sangat labil dan mempunyai potensi konflik yang besar karena rendahnya kemampuan *coalition-building*.<sup>41</sup>

**Nasikun** dalam bukunya *Sistem Sosial Indonesia* menyatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut sistem nilai yang berbeda di antara berbagai kesatuan sosial yang menjadi anggotanya sehingga para anggota masyarakat tersebut kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain<sup>42</sup>.

Dengan cara yang lebih jelas, **Pierre L. Van Den Berghe** menyebutkan beberapa karakteristik dari sifat-sifat suatu majemuk, *berikut ini*<sup>43</sup>;

---

<sup>40</sup> Ibid. hal 109

<sup>41</sup> Ibid. hal 109

<sup>42</sup> Ibid. hal 109

<sup>43</sup> Ibid. hal 109

- a. Terjadinya segmentasi kedalam bentuk-bentuk kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
- c. Kurang mengembangkan konsesus di antara para anggota-angotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- d. Secara relatif seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
- e. Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan didalam bidang ekonomi.
- f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

## **2. Kemajemukan Masyarakat Indonesia**

**Funnivall** dalam bukunya *Netherlands India : A Study of Plural Economi* (1967) mengungkapkan bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda paling tidak terdiri atas tiga golongan, yaitu<sup>44</sup>;

- a. Orang-orang Belanda/eropa sebagai golongan pertama.
- b. Orang-orang Tionghoa sebagai golongan menengah.
- c. Orang-orang Pribumi sebagai golongan ketiga.

---

<sup>44</sup> Ibid. hal 109

Kemajemukan masyarakat Indonesia sekarang ini ditunjukkan dengan struktur masyarakatnya yang unik. Masyarakat Indonesia ditandai dengan keanekaragaman dalam berbagai hal, *seperti* ras, suku bangsa, agama, adat, dan perbedaan-perbedaan kedaerahan<sup>45</sup>.

Keunikan masyarakat Indonesia lebih dipertegas lagi dengan kenyataan bahwa sekalipun merupakan masyarakat yang majemuk tetapi tetap kokoh sebagai suatu kesatuan yang tidak lagi hanya berupa idea atau cita-cita yang terdapat dalam lambang negara yaitu *Bhinneka tunggal Ika* tetapi sungguh merupakan kenyataan yang hidup (*living reality*). Namun, bukan berarti dalam masyarakat tidak ada konflik sama sekali. Kenyataannya yang demikian ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat dari sebuah negara bangsa (*nation state*). Konsep mengenai bangsa (*nation*) dijelaskan oleh **Ernes Renan**, bahwa bangsa merupakan suatu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai latar belakang sejarah, nasib atau penderitaan yang sama di masa lalu dan cita-cita yang sama untuk masa depannya.<sup>46</sup>

**Renan** menegaskan bahwa unsur-unsur dasar (*constituting elements*) yang sama dalam suatu bangsa bukanlah ras, bukan warna kulit, bukan

---

<sup>45</sup> Ibid. hal. 109.

<sup>46</sup> Ibid. hal. 109

bahasa, bukan agama, bukan batas-batas fisik, tetapi adalah hasrat untuk menjadi satu kesatuan (*the desire to be together*).

Faktor-faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut<sup>47</sup>;

- a) Keadaan geografis Indonesia.
- b) Indonesia yang terletak di antara dua samudera, yakni Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik.
- c) Iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama di berbagai Nusantara.

### **3. Kemajemukan Dalam Hal Ras**

Bahwa makhluk manusia yang hidup tersebar diseluruh bagian permukaan bumi dan yang hidup diberbagai lingkungan alam dan sosial menunjukkan adanya aneka warna yang nyata dilihat dari segi ciri-ciri badaniahnya. *Ciri-ciri badhaniah yang dimaksud antara lain*; warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk rambut, bentuk-bentuk bagian muka, dan sebagainya. Segolongan manusia yang didasarkan kepada persamaan ciri-ciri badaniah disebut ras<sup>48</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas, maka tidaklah benar sama sekali kalau dinyatakan bahwa perbedaan ras otomatis merupakan perbedaan ciri-ciri

---

<sup>47</sup> Ibid. hal. 110

<sup>48</sup> Ibid. hal. 111

rohani, bahwa orang kulit putih lebih pandai, lebih berbudaya, lebih maju pemikirannya daripada orang kulit berwarna. Kalau sekarang ini tampak gejala yang demikian, bahwa orang kulit putih lebih pandai dan seterusnya, hal ini sebenarnya karena faktor sejarah bukan faktor ras. Ras merupakan penggolongan atas dasar ciri-ciri jasmaniah belaka.<sup>49</sup>

Masalah bagaimana mengklasifikasikan manusia ke dalam aneka warna ras merupakan objek kajian antropologi ragawi (*somatologi*).

#### **I. Kemajemukan ras di Indonesia.**

- a) *Mongoloid Melayu Muda* (Deotero Malayan Mongoloid) Contohnya di Indonesia bagian barat.
- b) *Mongoloid Melayu Tua* (Proto Malayan Mongoloid) Contohnya di Toraja, Batak, dan Mentawai.
- c) *Austroid*, yaitu orang-orang di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara.
- d) *Melanesian Negroid* di Irian Jaya.
- e) *Asiatic Mongoloid*, yaitu orang-orang Cina.

#### **4. Kemajemukan Dalam Hal Suku Bangsa**

Menurut Koentjaraningrat (1986), *suku bangsa* atau *ethnic group* merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran akan

---

<sup>49</sup> op. cit hal 111.

kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan.<sup>50</sup>

Para ahli ilmu sosial pada tahun 1950-an pada umumnya menganggap kesukubangsaan dan perasaan identitas etnik sebagai gejala tradisional, sehingga hanya merupakan persoalan di negara-negara berkembang. Para ahli ekonomi bahkan berpendapat bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi akan membangun sifat pragmatis dalam masyarakat, sehingga akan mengatasi dan mengakhiri masa yang mementingkan ideologi etnik. Para ahli politik beranggapan bahwa dengan tercapainya kematangan politik dan demokrasi, masalah kesukubangsaan dalam negara-negara multietnik akan hilang dengan sendirinya.<sup>51</sup>

Namun, ternyata pandangan-pandangan tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1970 terjadi peningkatan konflik antarsuku bangsa, dan terjadilah fakta yang sungguh ironik bahwa berbagai pertentangan itu terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang atau negara yang sedang dilanda krisis ekonomi, namun juga terjadi di negara-negara yang ekonominya maju dan demokrasinya matang.

Memang perang etnik di Yugoslavia dan gerakan-gerakan perpecahan etnik yang akhirnya menghancurkan Uni Soviet dimulai ketika negara-negara itu mengalami krisis ekonomi.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; Rajawali Pers. Hal. 111

<sup>51</sup> Op. Cit. hal. 112.

Namun, tuntutan-tuntutan orang Irlandia, Skotlandia, dan Wales untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Inggris, tuntutan orang Kanada keturunan Perancis di Quebec dari Kanada, ataupun konflik yang tak putus-putusnya antara orang Vlaam dan Vallon di Belgia serta perjuangan orang Basque di Spanyol, tidaklah didorong oleh ketidakpuasaan ekonomi<sup>52</sup>.

Melihat kenyataan yang diuraikan di atas sudah sepantasnyalah kalau persoalan kesukubangsaan di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Kajian tentang suku, bangsa menjadi lebih penting, sebab Indonesia merupakan salah satu negara multietnik, dengan jumlah suku bangsa yang tidak mudah digambarkan karena para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai jumlah suku bangsa di Indonesia<sup>53</sup>.

**C. Van Vollenhoven** membagi masyarakat Indonesia ke dalam sembilan belas lingkungan hukum adat. **Koentjaraningrat** menyebutkan ke-19 lingkungan hukum adat ini disebut daerah kebudayaan atau *culture area*, sebagai berikut<sup>54</sup>:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Aceh.                  | 9. Gorontalo.                  |
| 2. Gayo, Alas, dan Batak. | 10. Toraja.                    |
| 2. a. Nias dan Batu.      | 11. Sulawesi Selatan / Makasar |

---

<sup>52</sup> Op. Cit. Hal. 111

<sup>53</sup> Op. Cit. Hal 112

<sup>54</sup> Ibid. Hal. 114

3. Minangkabau.
- 3.a. Mentawai.
4. Sumatera Selatan.
- 4.a. Enggano.
5. Melayu.
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan.
8. Minahasa.
- 8.a. Sangir Talaud.
12. Ternate.
13. Ambon-Maluku.
- 13.a. Kepulauan Barat Daya.
14. Irian.
15. Timor.
16. Bali dan Lombok.
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur.
18. Surakarta dan Yogyakarta.
19. Jawa Barat.

Semua suku bangsa di wilayah Indonesia mempunyai daerah asal, sedangkan golongan keturunan asing tidak memilikinya, karena daerah asal mereka terdapat di luar negeri (*Cina, Arab, dan India*), atau karena keturunan campuran (*Indo-Eropa*). Masyarakat terasing dianggap sebagai penduduk yang masih hidup dalam tahap kebudayaan sederhana, biasanya masih tinggal dalam lingkungan yang terisolasi<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Ibid. hal. 115



Dalam istilah resmi dan untuk kepentingan administrasi, pemerintah Indonesia membagi suku bangsa di Indonesia menjadi tiga golongan, *yaitu*<sup>56</sup>;

**a. Suku Bangsa**

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui perbedaan suku bangsa yang besar di antara penduduk Indonesia, dan menjamin persamaan status bagi semua suku bangsa yang ada, tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing suku bangsa. Suku bangsa mempunyai hak sama untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, membentuk pusat-pusat kebudayaan mereka sendiri, museum, dan lain-lain, namun bahasa yang digunakan dalam pendidikan resmi adalah bahasa Indonesia, meskipun selama 3 tahun pertama bahasa daerah digunakan di sekolah.

**b. Golongan Keturunan Asing**

Tidak seperti suku bangsa, penduduk yang termasuk golongan keturunan asing pada umumnya diharapkan berasimilasi dengan suku bangsa di daerah tempat mereka berada atau sepenuhnya menganut kebudayaan nasional Indonesia. Kehidupan nenek-moyang mereka hanya untuk dianut dalam kehidupan pribadi mereka. Orang Arab Indonesia dengan nyata telah mencapai asimilasi ini, dan mereka dibedakan dari penduduk asli melalui ciri-ciri ras mereka, sedangkan orang India-Indonesia dan orang-orang Indo-

---

<sup>56</sup> Ibid. Hal. 115

Eropa amat kecil dan tak penting jumlahnya, dan mereka terintegrasi atau menganut kebudayaan leluhurnya dalam pergaulan pribadi saja.

Sebaliknya, warga keturunan Cina, yang persentasenya kira-kira 3 persen dari seluruh penduduk, pada umumnya merupakan penduduk perkotaan. Di kota-kota Jawa mereka hanya berjumlah sekitar 10 persen dari kelompok keturunan asing tetapi mendominasi sektor ekonomi dari masyarakat kota. Karena itu, mereka merupakan kategori sosial yang amat penting.

### **c. Masyarakat Terasing**

Masyarakat terasing merupakan golongan suku bangsa yang terisolasi dan masih hidup dari berburu, meramu atau berladang padi, keladi, umbi-umbian dengan cara ladang berpindah. Dari segi perubahan dan kemajuan (*teknologi*) mereka mengalami hambatan karena isolasi geografi namun terkadang hambatan tersebut terjadi karena adanya upaya dari mereka untuk menolak segala perubahan kebudayaan apa pun, seperti halnya orang Badui di Banten<sup>57</sup>.

Banyak masyarakat terasing kini telah mengintegrasikan dirinya dalam kebudayaan nasional, dan kebudayaan tradisional mereka menghilang

---

<sup>57</sup> Ibid. Hal.116

dengan cepat. Beberapa golongan masyarakat terasing yang masih tertinggal adalah *sebagai berikut*<sup>58</sup>;

- 1) Orang Laut, yang bersifat pengembara.
- 2) Orang Darat, yang hidup tersebar di daerah dataran rendah berada di Sumatera Timur hingga ke kaki Bukit Barisan di pedalaman.
- 3) Penduduk Kepulauan Mentawai, yaitu di pulau-pulau sebelah barat Sumatera Barat .
- 4) Orang Badui di Banten Selatan, Jawa barat.
- 5) Orang Donggo di bagian pedalaman pegunungan Sumbawa Timur.
- 6) Kelompok pengembara orang Punan (*atau Penan*) yang berpindah- pindah sepanjang hulu sungai besar Kalimantan.
- 7) Orang Taijo di Sulawesi Tengah.
- 8) Orang Amma Toa di Sulawesi Tenggara.
- 9) Orang Togutil di Halmahera Utara.
- 10) Penduduk lembah-lembah pegunungan tengah Irian Jaya.

Adapun dasar-dasar persamaan suku bangsa di Indonesia *adalah*<sup>59</sup> ;

- 1) Persamaan kehidupan sosialnya.
- 2) Persamaan asas atas hak milik tanah.
- 3) Persamaan bentuk persekutuan masyarakat lain.
- 4) Persamaan hukum adat.

---

<sup>58</sup> Ibid. Hal 117

<sup>59</sup> Ibid. Hal.118

## 5. Kemajemukan Dalam Hal Agama

Selain perbedaan ras dan suku bangsa Indonesia juga memiliki keanekaragaman agama. Walaupun secara mayoritas Indonesia beragama Islam, namun Indonesia bukanlah Negara Islam, kesempatan dan kebebasan tetap diberikan kepada setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya<sup>60</sup>.

Dalam tesisnya, *Religion of java*. **Clifford Geertz** membagi masyarakat Islam Jawa menjadi tiga golongan, yaitu<sup>61</sup> ;

- a. priyayi sebagai golongan pertama,
- b. santri sebagai golongan menengah,
- c. abangan sebagai golongan ketiga.

Golongan priayi merupakan golongan yang berasal dari kaum bangsawan dan terpelajar. Golongan Santri adalah golongan masyarakat dengan kehidupan muslim yang taat. Sedangkan Golongan Abangan merupakan golongan masyarakat dengan kehidupan muslim yang lebih terkait pada norma-norma sosial dan kultural agama Hindu serta lebih sekuler (*golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan*)<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Ibid. hal. 118

<sup>61</sup> Ibid. hal. 119

<sup>62</sup> Ibid. hal. 119

## 6. Integrasi (*Persilangan*) dan Kosolidasi (*Tumpang Tindih*) Keanggotaan Warga Masyarakat dalam Kelompok-Kelompok Sosial.

Penggolongan masyarakat secara vertikal (*stratifikasi / pelapisan sosial*) maupun secara horizontal (*diferensiasi sosial / kemajemukan*) tidaklah menggunakan dasar-dasar atau faktor-faktor yang tunggal atau berdiri sendiri, tetapi bersifat kumulatif, sehingga sering terjadi interaksi (*persilangan*) dan konsolidasi (*tumpang-tindih*) keanggotaan anggota-anggota masyarakat dalam berbagai kelompok sosial yang ada didalam masyarakat<sup>63</sup>.

### 1) Pengertian Interaksi, konsolidasi, dan kelompok sosial.

Untuk memahami persoalan ini secara jelas lebih dahulu perlu disampaikan pengertian interaksi, konsolidasi, dan kelompok sosial, sebagai berikut<sup>64</sup>;

#### a. Interaksi.

Interaksi (*intersection*) dalam Kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh **Hassan Shadily**, antara lain diartikan sebagai titik potong atau pertemuan (*of two lines*); dapat pula disebut persilangan. Sedangkan istilah section (*seksi*) menurut Kamus Sosiologi yang disusun oleh **Soerjono Soekanto** antara lain diartikan sebagai suatu golongan etnik dalam masyarakat yang majemuk, *misalnya* suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Madura, dan seterusnya, masing-masing adalah seksi. Dari uraian ini maka

---

<sup>63</sup> Ibid. hal. 22

<sup>64</sup> Ibid. hal 119.

dapat dirumuskan bahwa interaksi merupakan persilangan atau pertemuan / titik potong keanggotaan anggota-anggota dari dua suku bangsa atau lebih dalam kelompok-kelompok sosial di dalam suatu masyarakat yang majemuk.

#### **b. Konsolidasi.**

Konsolidasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perbuatan (*hal, dan sebagainya*) memperteguh atau memperkuat (*perhubungan, persatuan, dan sebagainya*). Berdasarkan pengertian tersebut maka konsolidasi diartikan sebagai penguatan atau peneguhan keanggotaan anggota-anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial melalui tumpang-tindih keanggotaan.

#### **c. Kelompok Sosial.**

Kelompok sosial atau social group merupakan pengumpulan (*agresi*) manusia yang teratur. Kelompok sosial group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, yang disebabkan oleh adanya hubungan antara mereka yang menyangkut hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling menolong. Kriteria sistematik tentang kelompok sosial ini dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** dalam bukunya **Sosiologi Suatu Pengantar**, *sebagai berikut*<sup>65</sup>;

- 1) Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.

---

<sup>65</sup> Ibid. hal. 122

- 2) Ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan yang lain.
- 3) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang sama ini dapat berupa nasib yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, musuh bersama, atau merupakan kelompok etnik (*suku bangsa*) yang sama.
- 4) Kelompok tersebut mempunyai struktur, kaidah, dan pola perilaku tertentu.
- 5) Memiliki suatu sistem dan proses tertentu.

Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut maka tidak setiap himpunan manusia dapat disebut sebagai kelompok sosial, karena himpunan atau kesatuan dapat saja berupa kelompok yang tidak teratur atau kerumunan (*crowd*). Ciri-ciri suatu kerumunan antara lain, bersifat tidak tetap, berlangsung sementara karena kepentingan yang sama juga bersifat sementara, dan status individu yang ada di dalamnya menjadi kabur (*tidak jelas*).

#### **d. Jenis-jenis kelompok sosial.**

- 1) In-group dan Out-Group.

Di dalam masyarakat terdapat berbagai jenis kelompok sosial. Summer membedakan antara *In-group dan Out-Group*. *In-group* adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk

mengidentifikasi dirinya. Sedangkan *Out-Group* adalah kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan In-group-nya. Istilah “kami” atau “kita” menunjukkan adanya artikulasi in-group, sedangkan “mereka” betartikulasi Out-Group<sup>66</sup>.

*Contoh;*

*In-group sering di kaitkan dengan istilah “kami” aatau “kita” dan out-group sering dihubungkan dengan istilah “mereka”, misalnya kita kelas 3 IPS sedangkan mereka kelas 3 IPA, kami bangsa Indonesia sedangkan mereka bangsa Amerika. Jadi sikap-sikap in-group pada umumnya didasarkan oleh factor simpati dan perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya, sedangkan sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang bewujud antagonis atau antipati.*

## 2) Kelompok primer dan Sekunder

**Charles harton Cooley** mengemukakan tentang kelompok primer (*primary group*) yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya, kerja sama yang erat dan bersifat pribadi, interaksi sosial berlangsung secara tatap muka (*face to face*) karena biasanya selain kelompok ini kecil juga para anggotanya berdekatan secara fisik. Kelompok yang sering dibedakan dengan kelompok primer adalah kelompok sekunder. Meskipun sebenarnya **Cooley** tidak mengemukakan sebutan kelompok sekunder (*secondary group*), tetapi istilah ini sering tidak mengemukakan sebutan kelompok sekunder (*secondary group*), tetapi istilah ini sering

---

<sup>66</sup> Ibid. hal. 123



dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok yang tidak memiliki ciri kelompok primer. Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga sifatnya tidak begitu langgeng<sup>67</sup>.

### 3) Gemeinschaft dan gesellschaft

**Ferdinand Tonnies** mengemukakan tentang hubungan-hubungan antara individu-individu dalam kelompok sosial sebagai **gemeinschaft** (*paguyuban*) dan **gesellschaft** (*patembayan*). Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama dimana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Pada dasarnya hubungan ini, antara lain perasaan cinta atau rasa kesatuan batin. Bentuk ini dapat dijumpai didalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan seterusnya<sup>68</sup>.

Hubungan gemeinschaft mempunyai ciri-ciri, yaitu<sup>69</sup> ;

- a) intim (*intimate*) artinya berupa hubungan yang akrab dan mesra,
- b) privat (*private*) artinya hubungan-hubungan terjadi bersifat pribadi (*personal*), dan
- c) eksklusif (*exlusive*) artinya hubungan-hubungan yang terjadi bersifat khusus dan tertutup, artinya hanya untuk orang-orang tertentu.

---

<sup>67</sup> Ibid. hal. 120

<sup>68</sup> Ibid. hal. 121.

<sup>69</sup> Ibid. hal. 120

Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu (*yang pendek*) atau bersifat kontraktual. Bentuk ini dapat dijumpai dalam hubungan perjanjian perdagangan, organisasi suatu perusahaan, dan seterusnya<sup>70</sup>.

Hubungan Gesellschaft mempunyai ciri-ciri, *yaitu*<sup>71</sup>;

- a) hubungan terbatas pada urusan tertentu saja,
- b) merupakan hubungan antar status, bukan antar personal, dan
- c) bersifat public life, artinya hubungan berlaku untuk semua orang, dengan kata lain bersifat terbuka untuk siapa saja.

#### 4) Kelompok Formal dan Informal

**J.A.A. Van Doorn** membedakan antara kelompok formal dengan kelompok informal. Kelompok formal mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh para anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka, misalnya peraturan memilih ketua iuran anggota, dan seterusnya. Anggota-anggotanya mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu sebagaimana telah diatur. Hal ini berarti terdapat pembatasan tugas dan wewenang. Kelompok formal ini sering disebut asosiasi<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Ibid. hal. 121

<sup>71</sup> Ibid. hal. 122

<sup>72</sup> Ibid. hal. 122

**Robert M.Z. Lawang** mengemukakan bahwa suatu organisasi atau perkumpulan formal mempunyai ciri *sebagai berikut*<sup>73</sup>;

- a) memiliki identitas kolektif yang tegas (*misalnya tampak pada nama kelompok, simbol kelompok, dan seterusnya*).
- b) memiliki daftar anggota yang rinci.
- c) memiliki program kegiatan yang terus-menerus diarahkan kepada pencapaian tujuan yang jelas.
- d) memiliki prosedur keanggotaan.

Contoh perkumpulan formal antara lain berbagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, instansi pemerintah, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan sebagainya.

Kelompok informal tidak mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Kelompok ini biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang, misalnya kelompok belajar, klik, dan seterusnya<sup>74</sup>.

**Menurut Soerjono Soekanto (1995)**, klik (*clique*) adalah suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok besar. Klik ini ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antar anggota, biasanya bersifat "*antar kita saja*"<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Ibid. hal. 120

<sup>74</sup> Ibid. hal. 122

<sup>75</sup> Ibid. hal. 122

##### 5) Membership group dan reference group

**Robert K. Merton** membedakan antara kelompok membership (*kelompok keanggotaan*) dengan kelompok reference (*kelompok acuan / rujukan*). Kelompok membership merupakan kelompok yang para anggotanya tercatat secara fisik sebagai anggota, sedangkan kelompok reference merupakan kelompok sosial yang dijadikan sebagai acuan atau rujukan oleh individu-individu yang tidak tercatat dalam anggota kelompok tersebut untuk membentuk atau mengembangkan kepribadiannya atau dalam berperilaku<sup>76</sup>.

Dalam berbagai kelompok sosial itulah terjadi persilangan maupun konsolidasi keanggotaan antar anggota masyarakat. Persilangan atau konsolidasi itu dapat terjadi (*misalnya*) antara ras dengan agama, klan dengan suku bangsa, suku bangsa dengan suku agama, dan seterusnya. **Peter M. Blau (1977)** menyebut keadaan yang demikian ini sebagai *concolidated social structure* dan *intersected social structure*<sup>77</sup>.

## 7. Sarana-Sarana Pergaulan

Untuk terjadinya persilangan dan konsolidasi antara unsur-unsur masyarakat yang berbeda-beda itu perlu adanya sarana-sarana pergaulan antar mereka, sehingga terjadi komunikasi antarwarga masyarakat yang

---

<sup>76</sup> Ibid. hal. 123

<sup>77</sup> Ibid. hal 123

berasal dari berbagai golongan sosial maupun golongan etnik. Bagi bangsa Indonesia, sarana pergaulan antarsuku bangsa antara lain *sebagai berikut*<sup>78</sup> ;

a. Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai sarana pergaulan yang utama bagi terjadinya komunikasi antar suku bangsa yang sebenarnya memiliki bahasa beragam. Bayangkan kalau lebih dari tiga ratus suku bangsa yang ada di Indonesia menggunakan bahasanya masing-masing. Jika orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Minang menggunakan bahasa Minang, dan seterusnya maka tidak akan terjadi komunikasi antar suku bangsa yang berbeda. Dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai *lingua franca*, bahasa yang menyatukan orang-orang yang berbahasa dan berbudaya berbeda-beda<sup>79</sup>.

Bahasa Indonesia dapat berperan demikian karena memiliki keunggulan *sebagai berikut*<sup>80</sup>;

- 1) Tidak mengenal perbedaan tingkat sosial namun tetap menjaga sopan santun pergaulan.
- 2) Mudah dipelajari oleh segala macam putra Indonesia.

---

<sup>78</sup> Ibid. hal. 123

<sup>79</sup> Ibid. hal 123

<sup>80</sup> Ibid. hal 123

b. Pelabuhan.

Pelabuhan menjadi penting peranannya sebagai sarana pergaulan antarsuku bangsa karena bentuk wilayah secara geografis adalah kepulauan. Selain itu pelabuhan juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antar berbagai suku bangsa dalam bidang perdagangan.

Pasar juga penting artinya sebagai sarana pergaulan karena ditempat itulah anggota-anggota masyarakat saling bertemu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya<sup>81</sup>.

Di samping tiga hal tersebut ada pula hal-hal lain yang bisa dijadikan sarana pergaulan antar suku bangsa, *yaitu*; sekolah dan universitas, perkawinan campuran, dan program transmigrasi. Dengan adanya sarana-sarana pergaulan ini, maka warga masyarakat yang berbeda ras atau suku bangsa dapat bersama-sama menjadi anggota suatu golongan atau kelompok sosial tertentu, atau menjadi penganut suatu agama tertentu, dan seterusnya. Sebaliknya, mereka yang menganut agama yang berbeda bisa saja merupakan orang-orang berlatar belakang suku bangsa atau ras yang sama. Keadaan inilah yang disebut interaksi atau persilangan keanggotaan antar anggota-anggota masyarakat di dalam kelompok-kelompok social<sup>82</sup>.

Namun, mereka yang berbeda-beda suku bangsa dan agama tidak dengan sendirinya identik dengan suatu lapisan tertentu dalam pelapisan

---

<sup>81</sup> Ibid. hal 124

<sup>82</sup> Ibid. hal. 124

masyarakat. Misalnya, meski sama-sama suku bangsa Jawa, tetapi dalam sistem pelapisan sosial ada yang menempati lapisan bawah, lapisan tengah atau lapisan atas. Para menteri anggota kabinet pun berasal dari berbagai macam suku bangsa, daerah, dan agama. Demikian pula halnya pedagang, petani, buruh, pekerja pabrik, mahasiswa, guru, tentara, dan sebagainya dapat berasal dari berbagai suku bangsa, ras, dan agama<sup>83</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan suku bangsa, agama, ras, daerah, pelapisan sosial, dan sebagainya bisa saling silang-menyilang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keanggotaan dalam golongan-golongan yang juga saling silang-menyilang, dalam bahasa Inggris disebut *cross-cutting affiliations*, atau dalam pembahasan ini disebut interaksi (*intersection*), atau persilangan<sup>84</sup>.

Selain interaksi keanggotaan, terdapat juga konsolidasi atau tumpang-tindih keanggotaan. Seperti yang terdapat di beberapa masyarakat Indonesia khususnya antara suku bangsa dengan agama sehingga hal ini bisa dijadikan agama sekaligus identitas suku bangsa<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Ibid. hal. 124

<sup>84</sup> Ibid. hal. 125

<sup>85</sup> Ibid. hal. 128

## 8. Primordialisme, Etnosentrisme, dan berkembangnya Politik Aliran.

Primordialisme diartikan sebagai suatu pandangan atau faham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu (*dibawa sejak lahir*), seperti suku bangsa, ras, agama ataupun asal-usul kedaerahan, oleh seseorang dalam kelompoknya yang kemudian meluas dan berkembang<sup>86</sup>.

### 1) Sebab-sebab terjadinya primordialisme.

Primordialisme dalam masyarakat selalu ada dan terjadi, misalnya pada suku bangsa, golongan agama, dan partai. Terjadinya primordialisme disebabkan *hal berikut*:

- a. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial.
- b. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial terhadap ancaman dari luar. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai-nilai keagamaan, pandangan, dan sebagainya.

Orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kelangsungan hidup masyarakat sering menganggap primordialisme sebagai sesuatu yang bersifat primitive, regresif bahkan merusak. Setidaknya mereka menganggap bahwa primordialisme akan menghambat modernisasi, proses pembangunan, dan

---

<sup>86</sup> Ibid. hal. 128



merusak integrasi nasional. Jadi, primordialisme dipandang sangat negative karena mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa.

## 2) Etnosentrisme

Etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa merupakan suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku dimasyarakatnya. Karena yang dipakai adalah ukuran-ukuran yang berlaku di dalam masyarakatnya, maka orang akan selalu menganggap kebudayaannya mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kebudayaan masyarakat lain. Etnosentrisme memang tidak rasional, tetapi emosional dan sentimental. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai adalah perasaan bukan pemikiran yang jernih<sup>87</sup>.

Fanatisme kedaerahan telah menghilangkan pertimbangan-pertimbangan rasional, akibatnya tindakan-tindakan emosional yang mengarah kepada kerusuhan dan vandalisme lebih dominan terjadi. Pesolan-persoalan yang muncul akibat berkembangnya primordialisme dan etnosentrisme dalam hubungan antargolongan atau suku bangsa adalah permasalahan sara (*suku, agama, ras, dan antargolongan*).

---

<sup>87</sup> Ibid. hal. 126

Ada beberapa segi positif dan negatif dari etnosentrisme<sup>88</sup>;

- 1) Segi Positif Etnosentrisme;
  - a. Dapat menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.
  - b. Dapat mempertinggi semangat patriotisme.
  - c. Dapat mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa; misalnya dinyatakan dalam ungkapan “*right or wrong is my country*”.
- 2) Segi Negatif Etnosentrisme;
  - a. Mengurangi atau bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan.
  - b. Menghambat hubungan antarbangsa.
  - c. Menghambat proses asimilasi dan integrasi.
  - d. Merupakan kekuatan terpendam (*potensi*) terjadinya pertentangan atau konflik antar golongan.
- 3) Politik Aliran.

Politik aliran merupakan keadaan perpolitikan dimana partai-partai politik yang ada dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa baik formal maupun informal yang mengikutinya.

---

<sup>88</sup> Ibid. hal 126

## 9. Pengaruh Kemajemukan Masyarakat Indonesia (konflik dan Integrasi).

Kemajemukan masyarakat Indonesia menimbulkan masalah yaitu bagaimana membuat struktur masyarakat majemuk tersebut dapat terintegrasikan dengan kokoh. Untuk menjelaskan hal ini, ada beberapa karakteristik sifat dasar masyarakat majemuk seperti yang dikemukakan oleh **Van den Berghe** sebagai berikut<sup>89</sup>;

1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kebudayaan, tepatnya subkebudayaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
3. Kurang mengembangkan konsesus di antara para anggota-anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
4. Secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok.
5. Secara relatif sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan ketergantungan ekonomi.
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok yang lain.

Berdasarkan uraian **Berghe** di atas tampak jelas bahwa sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia sangat potensial terjadi konflik. Maka,

---

<sup>89</sup> Ibid. hal. 129

dalam pandangan para antropolog dan sosiolog, kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk tidak selalu membanggakan, namun dapat pula memprihatinkan atau setidaknya menjadi pemikiran, sebab perbedaan suku bangsa berarti juga perbedaan kebudayaan, perbedaan persepsi, perbedaan selera, perbedaan nilai, dan seterusnya yang merupakan potensi konflik sehingga menjadi kendala bagi terciptanya integrasi nasional<sup>90</sup>.

1) Konflik.

Sebagai proses sosial konflik atau pertentangan / pertikaian merupakan proses yang disosiatif, atau proses yang memecah atau membelah. Meskipun demikian, akibat dari suatu konflik tidak selalu negatif. Konflik pendapat sering disengaja dalam suatu diskusi atau seminar. Konflik ini akan diperoleh hal-hal yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas, suatu teori atau pernyataan yang semula tidak sempurna dapat lebih disempurnakan karena memperoleh berbagai perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada atau pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang ada. Terjadinya konflik antar kelompok, justru akan menguatkan ikatan dan integrasi dalam kelompok<sup>91</sup>.

Menurut **Soerjono Soekanto**, sebab-sebab terjadinya konflik *sebagai berikut*<sup>92</sup>;

- a. Perbedaan antarindividu, dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian atau pendapat.

---

<sup>90</sup> Ibid. hal.129

<sup>91</sup> Ibid. hal 130

<sup>92</sup> Ibid. hal.129

- b. Perbedaan kebudayaan yang menimbulkan prasangka.
- c. Bentrokan kepentingan, baik kepentingan di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya.
- d. Perubahan-perubahan sosial; perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat mengubah nilai-nilai sosial sehingga menimbulkan perbedaan pendirian antara golongan-golongan yang ada.

Konflik akan terjadi apabila golongan-golongan atau unsur-unsur yang berbeda tidak berhasil mencapai konsesus (*kesepakatan*) mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat dasar dan tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga tidak tercapai keselarasan antara satu golongan dengan yang lain. Singkatnya terjadi karena unsur-unsur yang saling berbeda tidak dapat saling menyesuaikan antara satu dengan yang lain<sup>93</sup>.

Menurut para penganut pendekatan konflik, konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, dengan kata lain, setiap masyarakat senantiasa mengandung konflik dalam dirinya karena setiap unsure dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi. Berbeda dengan pandangan para penganut pendekatan struktural fungsionalisme yang para pendukungnya antara lain; *Plato, Auguste Comte, Herberth Spencer, Emile durkheim, dan Talcott Parsons*. Para penganut pendekatan structural fungsionalisme ini menyatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah

---

<sup>93</sup> Ibid. hal 130

dapat dicapai secara sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium (*keseimbangan*) yang bersifat dinamis di atas konsesus para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang berifat umum<sup>94</sup>.

Sebagai bangsa yang majemuk (*plural*) dapat dikatakan tingkat integrasi masyarakatnya masih belum tangguh sehingga orang masih mudah terisolasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi ini dapat pada tingkat ideologis ataupun pada tingkat politis. Konflik tersebut dapat disimak dalam bentuk perbedaan pengertian dasar antara golongan-golongan ataupun kelas-kelas sosial mengenai berbagai macam hal.<sup>95</sup>

Konflik pada tingkat ideologis (*gagasan*), mudah disimak dalam hubungannya dengan kemajemukan agama. Konflik ideologis juga terjadi dalam konflik antarsuku bangsa karena antara keanggotaan agama dan suku bangsa sering terjadi tumpang tindih<sup>96</sup>.

Selain konflik pada tingkat ideologis, terdapat juga konflik pada tingkat politik. Sampai saat ini dan untuk beberapa waktu yang mendatang konflik pada tingkat ini masih merupakan masalah yang mencemaskan. Terjadinya kerusuhan-kerusuhan, aksi protes dan demonstrasi, ataupun armed attack (*serangan bersenjata*), juga kematian-kematian yang terjadi karena

---

<sup>94</sup> Ibid. hal. 130

<sup>95</sup> Ibid. hal. 130

<sup>96</sup> Ibid. hal. 130

kerusuhan dan armed attack merupakan contoh-contoh kasus yang diakibatkan oleh konflik pada tingkat politik<sup>97</sup>.

## 2) Integrasi.

Apabila mengikuti pandangan dasar para penganut pendekatan struktural-fungsionalisme, maka faktor yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia adalah kesepakatan para warga masyarakat akan nilai-nilai sosial yang bersifat dasar atau umum. Tidak disangsikan lagi bahwa pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu dan berbahasa yaitu Indonesia, tumbuh dari hasil gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20 yang berjiwa anti kolonialisme, merupakan konsesus nasional yang memiliki daya kuat dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Hal ini merupakan kesadaran nasional yang membuat penduduk Indonesia pada saat ini merasa sebagai satu bangsa, tidak saja dalam artian hukum, maupun sekedar angan-angan atau cita-cita yang tercantum dalam lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika tetapi juga benar-benar merupakan *living reality* atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia<sup>98</sup>.

## 10. Pengertian Masyarakat Plural

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pluralitas berasal dari kata plural ; jamak, lebih dari satu. Plularis adalah kategori

---

<sup>97</sup> Ibid. hal. 131

<sup>98</sup> Ibid. hal. 132

jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua, bahan yang mempunyai dualis<sup>99</sup>.

Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (*bersangkutan dengan system social dan politik*), meliputi kebudayaan dengan berbagai ragam dan perbedaannya di dalam sebuah masyarakat. *Populis* adalah penganut paham populisme. *Populisme* adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Sementara progresif adalah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan (*politik*), bertingkat – tingkat naik. *Progresivitas* adalah kemampuan bergerak maju secara psikologis<sup>100</sup>.

Jadi *masyarakat plural* adalah masyarakat majemuk yang ditandai adanya beragam suku bangsa, agama, budaya atau adat - istiadat. Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan kerja sama dengan sikap toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memperkuat ketahanan sosial suatu komunitas<sup>101</sup>.

Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini, meskipun dalam arti tertentu pluralisme keagamaan selalu ada bersama kita. Setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai

---

<sup>99</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka 1995 (hal 883-897).

<sup>100</sup> Nottingham, K. Elizabeth. 1994. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. hal. 47

<sup>101</sup> Ibid. hal. 62



tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru dan perkembangan agama<sup>102</sup>.

Pluralisme pertama – tama di mulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keberagaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus dirayakan dan diramgkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni. Adapun anggapan, bahwa pluralisme akan menjadi sinkretisme merupakan pandangan yang cenderung mengada – ngada. Faktanya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik<sup>103</sup>.

Pluralisme makin mendapat tantangan, karena tindakan intoleransi sepanjang tahun 2009 masih menjadi momok yang menakutkan. Setidaknya menurut pantauan Moderate Muslim Society, ada sekitar 59 tindakan intoleransi. Puncaknya adalah aksi terorisme yang membuktikan, bahwa eksremisme dengan mengatasnamakan paham keagamaan tertentu masih mengemuka. Pelaku dan jaringannnya berhasil ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi paham dan habitatnya masih terus berkembang<sup>104</sup>.

Fatwa keagamaan berupa penyesatan dan pengharaman terhadap kelompok minoritas dalam intra agama sepanjang tahun 2009 juga menjadi tantangan serius. Fatwa tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindakan

---

<sup>102</sup> Ibid. hal. 49

<sup>103</sup> Ibid. hal. 50

<sup>104</sup> Ibid. hal. 52

hukum yang dapat dianggap sebagai diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas. Fatwa tersebut kerap kali dijadikan sebagai landasan untuk melarang kegiatan dan memejahijaukan mereka menggunakan UU NO. 1 / PNPS / 1965 dan KUHP Pasal 156a tentang penodaan agama. Disamping itu, kelompok minoritas harus mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari sekelompok masyarakat yang tidak beridentitas, baik penyerangan maupun pengusiran<sup>105</sup>.

Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara dengan kembali kepada nilai-nilai luhur yang pasti melekat pada sebagian besar orang, kelompok, dan masyarakat di Negeri ini. Persoalannya tidak setiap orang atau kelompok yang mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. Padahal dengan saling mengenal, kelompok masyarakat yang plural dapat mengembangkan apresiasi, penghormatan, bahkan kerja sama antara yang satu dengan yang lain<sup>106</sup>.

Menurut **Subkhan (2007:29)** menyatakan pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai di mana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi, seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif

---

<sup>105</sup> Ibid. hal. 53

<sup>106</sup> Ibid. hal. 55

dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan<sup>107</sup>.

Pluralisme agama yang berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan beberapa implikasi positif: **Pertama**, pemahaman kemajemukan agama bukan lagi sekedar “*kenyataan*”, melainkan menjadi “*keharusan*” yang tidak dapat dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling memperhatikan yang lahir dari kesadaran interdependensi. Pada kondisi ini, agama didorong memberi kontribusi karena interdependensi agama mensyaratkan ketidakaktifan satu agama akan berpengaruh kepada hasil - hasil yang akan dicapai. Jika kesadaran interdependensi agama terus bertumbuh, partisipasi agama - agama dapat dimaksimalkan. **Kedua**, pluralisme agama berbasis solidaritas intelektual menjunjung prinsip *take and give*.

Dialog yang baik akan menghasilkan perubahan kedua belah pihak. **Ketiga**, berdasarkan solidaritas intelektual, pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebatas negatif *immunity*, bahwa agama harus bebas dari cengkaman sosial-politik termasuk negara. **Keempat**, pluralisme

---

<sup>107</sup> Ibid. hal. 60

agama dengan solidaritas intelektual berpotensi menghasilkan nilai – nilai yang mengandung *common good*<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Ibid. hal . 62

## BAB III

### DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data secara empiris dari permasalahan yang di ajukan mengenai Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural yang terdapat didaerah tempat tinggalnya yang di lihat dari sikap dan pola prilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan benar-benar hidup dan berkembang.

#### B. Tempat Dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang *Informan* yang terdiri dari ; Tokoh Masyarakat, Suku Betawi, Etnik Tionghoa, Suku Jawa, Suku Sunda, Tokoh Agama Kristen, Suku Batak, Tokoh Agama Islam dan Tokoh Kepemudaan. Sedangkan untuk **Key Informan** adalah Bapak H. Sujito selaku Lurah Jatirasa yang bertugas di sekitar Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

Waktu penelitian dilaksanakan dilaksanakan sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 yang dilakukan di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

### **C. Metode Penelitian.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai peranan masyarakat dalam memahami budaya demokrasi pada masyarakat plural.

Dalam metode yang bersifat deskriptif ini peneliti akan mendapatkan informasi-informasi mengenai peranan masyarakat dalam memahami budaya demokrasi pada masyarakat plural.

### **D. Alat Pengumpulan Data.**

Untuk memperoleh data mengenai peranan masyarakat dalam memahami budaya demokrasi pada masyarakat plural. Peneliti ini dilakukan dengan Pedoman Wawancara ;

- 1) Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang telah diperoleh secara mendalam. Dan dilakukan terhadap sejumlah informan dan key informan. Untuk wawancara diperlukan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, dengan terlebih dahulu menetapkan dan

menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan dan berhubungan dengan penelitian (*terstruktur*).

**Wawancara** dalam penelitian ini adalah 9 orang **Informan** yang terdiri dari ; Tokoh Masyarakat, Suku Betawi, Etnik Tionghoa, Suku Jawa, Suku Sunda, Tokoh Agama Kristen, Suku Batak, Tokoh Agama Islam dan Tokoh Kepemudaan.

*Sedangkan* untuk **Key Informan** adalah Bapak H. Sujito selaku Lurah Jatirasa yang bertugas di sekitar Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

- 2) Dokumentasi dalam proses penelitian ini adalah dengan pencatatan atau catatan lapangan yang peneliti lakukan selama peneliti melakukan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan untuk menyimpan dokumen – dokumen yang dianggap penting dan dapat membuktikan secara fakta yang memiliki hubungan dengan peneliti seperti keadaan masyarakatnya, tempat ibadah lainnya, lokasi, identitas informan dan key informan, foto pada saat peneliti melakukan wawancara dan surat – surat yang berhubungan dengan hasil penelitian.

## **E. Teknik Kaliberasi Data**

### **1. Melaksanakan Diskusi Dengan Informan Dan Key Informan.**

Dalam rangka memperkaya penelitian dilakukan diskusi dengan informan dan key informan dengan demikian dapat memperoleh masukan dan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diskusi dengan informan dan key informan juga dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti tentang Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.

### **2. Auditing Dengan Dosen Pembimbing**

Teknik ini digunakan agar peneliti mendapatkan masukan dan saran yang berarti bagi peneliti, baik dalam tahap proses maupun hasil. Dalam hal ini yang dilakukan oleh dosen pembimbing Seminar Hasil Penelitian sebagai auditor adalah mempelajari data dari tahap pembuatan proposal sampai dengan tahap akhir penelitian dan meminta penjelasan kepada peneliti tentang data-data tersebut, selanjutnya memberikan masukan dan saran yang berguna bagi penelitian ini.



**F. Teknik Analisis Data.**

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Data - data yang terkumpul di analisis dan dipaparkan secara deskriptif (*terurai*).

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data.**

##### **I. Karakteristik Masyarakat Pondok Benda.**

Pondok Benda adalah nama sebuah kampung yang berada di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Berdasar keterangan warga, wilayah tersebut merupakan lokasi pengungsian semasa pra kemerdekaan<sup>1</sup>.

Salah satu pusat pengungsian adalah di sekitar pohon benda yang terdapat di sana. Mereka lalu membuat pondok di sekitar pohon benda. Setelah itu, wilayah itu dikenal sebagai Kampung Pondok Benda<sup>2</sup>.

Setidaknya itu lah yang dikatakan salah seorang warga Sarmilih (56). “Kalau menurut cerita dari nenek dan orang tua bapak dulu di sini, tempat pemondokan pengungsi pada masa penjajah dan terdapat pohon benda, jadi dinamakan Kampung Pondok Benda<sup>3</sup>.”

---

<sup>1</sup> Sumber ; Laporan Akhir Tahun Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2010 Jilid 1 Hal. 10

<sup>2</sup> Ibid. hal . 11

<sup>3</sup> Ibid. hal . 12

Berdasarkan penelusuran di wikipedia, benda, tekalong, atau terap adalah sejenis *pohon* buah yang masih satu *marga* dengan *nangka* (*Artocarpus*). Buahnya mirip dengan buah *timbul* atau kulur, dengan tonjolan-tonjolan serupa duri lunak panjang dan pendek, agak lengket. Nama ilmiahnya *Artocarpus elasticus*<sup>4</sup>.

Di *Jawa Barat* dikenal sebagai *teureup*, dan dalam *bahasa Jawa* dikenal sebagai *bendhå*. Buah benda yang telah masak dimakan dalam keadaan segar, *bijinya* dapat dimakan setelah *direbus* atau *digoreng*. *Getah* benda sering digunakan sebagai perekat untuk menjerat *burung*<sup>5</sup>.

Pendapat yang sama dikatakan Samad Reban (55). “Kalau bapak *nggak* tahu persis, waktu bapak lahir udah bernama Pondok Benda. Cuman, orang tua sering cerita bahwa di sini terdapat salah satu pemondokan tempat orang-orang sembunyi dari kejaran penjajah di situ terdapat pohon benda yang sangat besar”<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Ibid. hal . 13

<sup>5</sup> Ibid. hal . 14

<sup>6</sup> Ibid. hal . 15

Di tempat terpisah Lurah Jatirasa Sujito mengatakan, Kampung Pondok Benda termasuk dalam wilayahnya. Di sana terdapat 15 RW dan 127 RT. Sementara itu, wilayah seluas 275 hektar<sup>7</sup>.

Masyarakat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini memiliki semangat religius keislaman yang sangat kuat dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Sebagian besar mayoritas penduduknya memeluk agama islam dan suku Betawi, tetapi pemeluk agama dan suku yang lainnya dapat hidup berdampingan dengan damai. Dalam hal ini, Wilayah Pondok Benda ini bisa menjadi salah satu contoh pluralisme di Indonesia<sup>8</sup>.

Adapun untuk kesenian tradisional yang ada di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini adalah Tari Gegot, Tari Topeng Tunggal, Tari Ronggeng Blantek, Tari Ajeng, Tari Enjot-Enjotan, jaipongan, gambang kromong, Tanjidor. Sedangkan makanan tradisonalnya adalah Sayur Gabus Pucung, Dodol Betawi, Wajid, Kue Akar Kelapa, kue Rangginang, Kue Sagon, Kue Duit, dan Kue Geplak<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid. hal . 16

<sup>8</sup> Ibid. hal . 17

<sup>9</sup> Ibid. hal . 18

Kesenian dan makanan tradisional tersebut bisa kita jumpai pada upacara khaulan, perkawinan maupun khitanan yang kini masih di jaga kelestariannya secara turun temurun<sup>10</sup>.

Pada perkembangannya kini Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini jauh berbeda dengan yang dulu dan semakin pesat pembangunannya. Selain menjadi wilayah pemukiman, Wilayah Pondok Benda ini juga berkembang pusat perdagangan, jasa dan industri. Sesuai dengan Pemerintah Kota Bekasi yang telah mengembangkan Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) yang mendapatkan Citra Pelayanan Publik Tingkat Nasional, maka dengan hal ini di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktifitas masyarakat, *seperti* ; pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana transportasi darat terus dievaluasi dan dikembangkan. Bus Pariwisata, Bus AKAP, Mikrolet serta alat transportasi lainnya dan sudah memiliki trayek cukup banyak sehingga mobilitas masyarakat, barang dan jasa sehari-hari dapat berjalan dengan lancar<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibid. hal . 19

<sup>11</sup> Ibid. hal . 20

Selain itu juga terdapat akses jalan tol JORR (Jakarta Out Ring Road) yang menghubungkan Tol Jagorawi dengan Cikunir, Tol Dalam Kota, Tol Jakarta-Cikampek setelah dibangunnya jalan tol Cipularang yang menghubungkan secara cepat antara Jatiasih dan Bandung<sup>12</sup>.

Perkembangan sektor industri, perdagangan, dan Swalayan di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih kini mulai berkembang pesat, *seperti* ; NAGA Jatiasih dan Giant Jatiasih, Alfamar, Indomaret, dan lain-lain<sup>13</sup>.

Berkembangnya berbagai potensi daerah yang terdapat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini, juga tidak lepas dari adanya fasilitas akomodasi seperti perhotelan serta dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri yang selalu menyiapkan segala fasilitas apabila investor akan masuk di Wilayah Pondok Benda Kecamatan Jatiasih ini. Demikian pula fasilitas perbankan dan perumahan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid. hal . 21

<sup>13</sup> Ibid. hal . 22

<sup>14</sup> Ibid. hal . 23

## II. Karakteristik Wilayah Kelurahan Jatirasa.

Pemerintah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi terbentuk pada tahun 1983 yang merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Jatiasih yang sebelumnya masih berstatus Desa, selanjutnya berubah menjadi Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2002<sup>15</sup>.

Kelurahan Jatirasa terdiri dari perkampungan (*bernama Kampung Pondok Benda*), dan saat dibuat laporan ini di wilayah kami terdapat 5 (*lima*) perumahan, sehingga dengan demikian terdapat masyarakat yang sangat majemuk, karena terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang dari berbagai daerah yang memiliki latar belakang, adat istiadat, pendidikan dan agama yang berbeda, maka dengan demikian menjadi beban tersendiri bagi Pemerintahan Jatirasa, baik dalam pelayanan masyarakat maupun menentukan skala prioritas pembangunan, apalagi hampir setiap tahun beberapa perumahan menghadapi ancaman banjir kiriman<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Sumber ; Laporan Akhir Tahun Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2010 Jilid 2 Hal. 1

<sup>16</sup> op.cit . hal .1

Untuk lebih mengetahui dan mengenal keadaan Kelurahan Jatirasa berikut akan kami uraikan kondisi geografis Kelurahan Jatirasa<sup>17</sup> :

## **1. Keadaan Wilayah.**

### **a. Kondisi Geografis.**

Luas wilayah	: 273,945 Ha
Tanah darat	: 270,745 Ha
Tanah sawah	: 10,00 Ha
Ketinggian dari permukaan laut	: 75 m
Curah hujan	: mm
Jarak dengan Ibu Kota Negara	: 9 km
Jarak dengan Ibu Kota Propinsi	: 185 km
Jarak dengan Ibu Kota Bekasi	: 7 km

### **b. Batas Kelurahan sebagai berikut :**

Sebelah Utara : Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan.

Sebelah Timur : Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa-Lumbu.

Sebelah Selatan : Desa Bojong Kulur Kabupaten Bogor.

Sebelah Barat : Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih.

---

<sup>17</sup> op.cit. hal . 1



**c. Sarana Keagamaan.**

- Masjid : 19 Buah.
- Mushollah : 17 Buah.
- Gereja : 3 Buah.
- Wihara : -
- Klenteng : -
- Majelis Ta'lim : 20 Buah.
- TPA : 10 Buah.
- Yayasan : 10 Buah.
- Pondok Pesantren : 2 Buah.

Berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini, walaupun di samping ada Masjid ada Gereja. Maka dengan hal ini ada kebebasan, tapi dengan kepedulian pemerintah setempat menyatu dengan berbagai lapisan masyarakat baik itu Tokoh Muslim maupun Non-Muslim, Majelis-Majelis Ta'lim, Tokoh Pemuda, Tokoh - Tokoh Masyarakat setempat dan kita berikan penjelasan dan pengertian kepada warganya bahwa kita hidup bermasyarakat harus hidup rukun dan berdampingan. Karena agama apapun mengajarkan kepada umatnya agar berbuat positif dan berbuat hal yang baik antara sesama umatnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> ibid. hal . 21

## 2. Jumlah Penduduk.

Perkembangan penduduk di Wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi selama tahun 2010 cukup terkendali, namun masih mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya urbanisasi dan bertambahnya angka kelahiran seperti terlihat pada tabel 1.1<sup>19</sup>.

**Tabel 1.1**

### **Jumlah Penduduk Di Wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2008	11.962	11.696	23.658
2	2009	11.638	11.801	23.439
3	2010	12.106	11.954	24.060

Sumber ; Laporan Akhir Tahun Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2010

---

<sup>19</sup> ibid. hal . 8

Jumlah Penduduk di Wilayah Kelurahan Jatirasa dapat dibagi dalam 4 (empat), yaitu :

**a. Berdasarkan Kelompok Umur.**

**Tabel 1.2.**

<b>NO.</b>	<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>0 s.d. 4</b>	1131	1121	2252
<b>2.</b>	<b>5 s.d. 9</b>	1007	1002	2009
<b>3.</b>	<b>10 s.d. 14</b>	971	970	1941
<b>4.</b>	<b>15 s.d. 19</b>	966	964	1930
<b>5.</b>	<b>20 s.d. 24</b>	970	953	1923
<b>6.</b>	<b>25 s.d. 29</b>	986	879	1865
<b>7.</b>	<b>30 s.d. 34</b>	888	869	1757
<b>8.</b>	<b>35 s.d. 39</b>	851	840	1691
<b>9.</b>	<b>40 s.d. 44</b>	849	853	1702
<b>10.</b>	<b>45 s.d. 49</b>	840	844	1684
<b>11.</b>	<b>50 s.d. 54</b>	807	807	1614
<b>12.</b>	<b>55 s.d. 59</b>	763	767	1530
<b>13.</b>	<b>60 s.d. 64</b>	630	634	1264
<b>14.</b>	<b>65 tahun keatas</b>	447	451	898
	<b>Jumlah</b>	<b>12.106</b>	<b>11.954</b>	<b>24.060</b>

Sumber ; Laporan Akhir Tahun Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2010

**a. Menurut Agama.**

- Islam : 23.584 orang
- Kristen : 267 orang
- Khatolik : 171 orang
- Hindu : 10 orang
- Budha : 28 orang

Berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini di samping masyarakat mayoritasnya agama muslim tetapi tetap akur dengan agama yang lainnya. Hal ini masyarakat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini masih selalu menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa baik dalam agama, ukhuwah islamiyah, maupun dalam bermasyarakat.

**b. Menurut Pendidikan.**

- S-2 : 74 Orang
- Sarjana : 368 Orang
- Sarjana Muda : 507 Orang
- SLTA : 3.242 Orang
- SMP : 5.598 Orang
- SD : 5.823 Orang

**c. Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan.**

- PNS : 1.284 Orang
- TNI : 287 Orang
- Pegawai BUMN : 75 Orang
- POLRI : 56 Orang
- Dokter : 4 Orang
- Wiraswasta : 986 Orang
- Pegawai Swasta : 956 Orang
- Buruh : 1.034 Orang
- Pensiunan : 1.119 Orang

Jumlah Kepala Keluarga pada akhir Desember 2010 adalah 6.425.

**B. Temuan Penelitian.**

Terkait dengan temuan penelitian, penulis akan menjelaskannya berdasarkan indikator Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural ;

**1. Pengambilan Keputusan.**

Dalam setiap keputusan di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini pada umumnya selalu melakukan musyawarah dengan baik dalam setiap pengambilan suatu keputusan.

Kita sebagai warga di sini, warga pendatang, tokoh etnik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun dari pemerintah setempat di undang dalam setiap pengambilan keputusan tersebut, dimana dalam setiap pengambilan keputusan tersebut di bawa ke suatu forum untuk di musyawarahkan dengan lapisan masyarakat agar tidak ada saling terjadi kecemburuan sosial sehingga tercipta suasana masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

## **2. Perbedaan Pendapat.**

Perbedaan pendapat di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini alhamdulillah sudah cukup baik. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat di wilayah kita ini berbeda suku bangsa maupun agama tentu yang namanya perbedaan pendapat pasti ada, namun dalam hal ini masih bisa kita atasi yaitu tadi kita undang tokoh-tokohnya terutama RT/RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama maupun pemerintah setempat kita kumpulkan di sebuah forum dialog untuk di cari permasalahannya dan di jelaskan dalam musyawarah bagaimana supaya perbedaan yang ada tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Jadi apabila terjadi perbedaan pendapat kita tetap melibatkan RT/RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh agama maupun pemerintah setempat yang ada di sekitarnya untuk kita dibahas bersama dan di cari jalan keluarnya dan pemecahannya, insya Allah akan berjalan dengan aman, damai, dan tertib.

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintah**

Partisipasi masyarakat dalam pemerintah di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini sudah sangat bagus baik itu dari masalah Pembangunan maupun masalah Pemilihan Umum.

**Yang pertama** dalam masalah Pembangunan pasti ada perencanaan pembangunan yang terdapat di pemerintah setempat yaitu semacam pelaksanaan pembangunan selalu mengadakan pelaksanaan perencanaan masyarakat pembangunan yang diadakan setiap setahun sekali. Jadi kita merencanakan pembangunan yang diadakan setiap setahun sekali yaitu dengan melibatkan LKMD kalau sekarang LPM, tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan kita bahas pelaksanaan pembangunannya baik itu dalam bidang fisik, bidang ekonomi, maupun juga di bidang kemasyarakatan.

**Yang kedua** dalam hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum alhamdulillah partisipasi masyarakatnya sangat bagus karena mereka sebagai warga yang baik mempunyai hak untuk mengeluarkan suaranya baik dalam Pemilihan Umum Nasional tapi dalam pemilu Pilkadaupun baik Pilkada Tingkat II atau Pilkada Tingkat I.

**Yang ketiga** dalam hal Keamanan di wilayah ini juga sangat bagus dalam menjaga keamanan lingkungannya yaitu dengan adanya siskamling yang dilakukan oleh warganya sehingga tercipta suasana yang aman, tertib, dan damai.

**Yang keempat** dalam hal yang berkaitan dengan kebersihan, alhamdulillah di wilayah ini sudah cukup bagus yaitu dari kesadaran warganya akan peran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, contohnya warga disini tidak membuang sampah sembarangan dan seluruh lapisan masyarakat selalu turut ikut serta dalam kegiatan gotong royong.

#### **4. Menumbuhkan Semangat Berdemokrasi.**

Menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warga di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini sudah cukup bagus untuk selanjut-selajutnya agar budaya demokrasi di wilayah Pondok Benda



Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini tetap di pertahankan budaya demokrasi yang suda ada. Contohnya yang berkaitan dengan cara kita untuk menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warga kita sudah tentu kita sampaikan melalui sosialisasi-sosialisasi atau pada rapat minggon (*mingguan*) yang di selenggarakan di tingkat Kelurahan.

Disini bila ada setiap kesempatan apabila ada undangan dari setiap masyarakat kita memberikan semangat untuk berdemokrasi, hal ini kita contohkan saja di samping setiap pemilihan RT/RW sekarang sudah dilaksanakan secara demokrasi, jadi masyarakatnya bebas mennetukan pendapatnya untuk memilih siapa dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dan satu orang satu suara. Jadi kita berikan kebebasan siapakah yang akan dipilih, dan itulah hasil yang dipilih oleh masyarakat tersebut.

##### **5. Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Atau Yang Ada.**

Masyarakat di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini alhamdulillah sangat baik dalam mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang ada, walaupun secara keseluruhan sudah tentu ada yang taat dan ada juga yang tidak taat. Contohnya patisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memang ada saja warga yang bandel tetapi dari pemerintah setempat untuk di berikan

motivasi dengan harapan PAD di wilayah kita itu bisa tercapai yang khususnya berkaitan dengan pembangunan daerah.

## **6. Pelaksanaan HAM.**

Untuk Pelaksanaan yang terkait dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini untuk saat ini sudah cukup baik, memang tadinya gejala pernah juga ada yang berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama karena di wilayah ini di samping masyarakat mayoritasnya agama muslim tapi ada juga non-muslim tetapi alhamdulillah bisa di atasi oleh pemerintah setempat dan sampai sekarang alhamdulillah masyarakatnya aman, tertib dan damai.

Maka dengan hal ini ada kebebasan dan kepedulian pemerintah setempat di wilayah ini sudah sangat bagus. Disini kepedulian pemerintah setempat terhadap warganya bisa di tunjukkan dalam pertemuan-pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, dan warga setempat kita undang dalam suatu wadah forum pertemuan untuk di berikan penjelasan dan pengertian kepada warganya bahwa kita hidup berdampingan maka akhirnya mereka mengerti. Karena agama apapun mengajarkan kepada umatnya agar berbuat positif dan berbuat hal yang baik antara sesama umatnya, yaitu selalu bersikap toleransi, saling

menghormati, saling menghargai baik antar umat beragama maupun dengan antar suku.

### **7. Hidup Berdampingan Secara Damai.**

Untuk masalah hidup berdampingan secara damai di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini sangat bagus, yaitu masyarakatnya dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjaga rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa baik antar suku maupun antar agama. Contohnya saja di wilayah ini mayoritas penduduknya sebagian besar suku Betawi tetapi mereka mau berbaur dengan warga yang berbeda suku, begitupun dengan soal agama di wilayah ini walaupun mayoritas penduduknya sebagian besar agama islam tetapi mereka mau berbaur juga dengan agama yang lain.

Jadi di wilayah ini pada dasarnya ada toleransi, saling menghormati, saling menghargai, serta adanya keterbukaan antara mayoritas etnis, antar suku, antar agama, dan warga sekitarnya.

### **C. PEMBAHASAN.**

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian, Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini sudah sangat baik, hal ini di tunjukkan dari sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga Negara dalam mempraktikkan konsep

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pola sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti menyelesaikan* persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai.

**Yang Pertama** *mengenai pengambilan keputusan*, dalam setiap pengambilan keputusan tersebut tidak di ambil secara individual tetapi secara musyawarah, jadi intinya setiap yang akan mengambil suatu keputusan tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu dan di ambil keputusan secara bersama.

**Yang Kedua** *mengenai perbedaan pendapat*, yang namanya perbedaan pendapat pasti ada di dalam masyarakat plural, kalau plural berarti banyak, entah itu beda keyakinan, beda agama, beda pemikiran, ataupun beda kebudayaan. Bila ada perbedaan pendapat kita kumpulkan di sebuah forum dialog bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, pemerintah setempat dan para warga untuk kita cari

permasalahannya dan kita bahas bersama agar memperoleh jalan keluar dan pemecahannya.

**Yang Ketiga** mengenai *partisipasi masyarakat dalam pemerintahan*, dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemerintahan bisa ditunjukkan berupa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum maupun dalam perencanaan pembangunan daerah baik di bidang fisik, ekonomi, pendidikan, maupun juga di bidang kemasyarakatan.

**Yang Keempat** mengenai *peran serta pemerintah dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi kepada warganya*. Hal ini bisa melalui himbauan-himbauan, ajakan-ajakan, dan sosialisasi-sosialisasi yang di sampaikan dari pemerintah kepada warganya supaya kita bisa hidup atau bisa menumbuhkan rasa demokrasi dalam diri kita, sehingga warganya bisa mengerti dan tahu apa itu berdemokrasi dan mau menjalankan demokrasi yang ada di Negara kita tercinta ini.

**Yang Kelima** mengenai *masyarakat dalam mentaati peraturan-peraturan*, dalam hal ini Negara kita berdasarkan hukum jadi semua warganya taat dan patuh terhadap hukum yang ada di Negara kita ini.

**Yang Keenam** mengenai *pelaksanaan HAM*. Hal ini semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudraan.

**Yang Ketujuh** *hidup berdampingan*. Hal ini perlu kita jaga dalam suatu kehidupan yang ada di Negara kita tercinta ini. Masyarakat kita seharusnya sadar bahwasanya Negara kita ini berdemokrasi, Negara kita ini plural banyak keanekaragaman yang jelas Bhineka Tunggal Ika, walaupun perbedaan-perbedaan yang ada kita menyikapinya dengan secara baik, karena kita tahu bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah kekayaan dari pada Negara kita ini.

Jadi kita yakin bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan untuk kita jadikan sebagai suatu perpecahan, tapi perbedaan itu kita memaksimalkan, kita jadikan untuk menjadi suatu kekayaan yang kita miliki dan harus kita jaga, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kita menjadi terpecah belah, tidak menjadi alasan untuk menyerang antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya serta warganya selalu menumbuhkan toleransi, saling menghormati, saling menghargai baik antar suku maupun antar agama sehingga tercipta masyarakat aman, damai, dan tertib.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian tentang *Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih* “ yang dilihat dari sikap dan pola masyarakat dalam berdemokrasi pada masyarakat plural.

Sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga Negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sikap dan pola perilaku yang berpandangan hidup untuk mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perilaku yang sama terhadap semua warga Negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, *seperti menyelesaikan* persoalan melalui permusyawaratan, menghormati berbagai pendapat yang berbeda dan mempertimbangkan serta dapat memahaminya, mengajak segenap lapisan masyarakat dan berbagai komponen yang ada untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, menumbuhkan semangat untuk berdemokrasi, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati HAM, serta hidup berdampingan secara damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya budaya demokrasi pada masyarakat plural di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini dapat membangun suatu budaya demokrasi pada masyarakat plural dengan baik.

Dalam hal ini berdasarkan beberapa temuan sebagai berikut ;

1. Pengambilan Keputusan.

Bahwa dalam setiap pengambilan suatu keputusan tersebut bukan secara individual tetapi dengan cara musyawarah, dalam musyawarah tersebut dilakukan dalam sebuah forum yang di hadiri oleh RT/RW, Tokoh Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan pemerintah setempat untuk di musyawarahkan dengan masyarakat.

2. Perbedaan Pendapat.

Bahwa dalam suatu perbedaan pendapat itu perlu di bahas dalam suatu forum yang di hadiri oleh Pemerintah Setempat, Tokoh Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat bersama warga untuk di cari permasalahannya apa dan selanjutnya kita cari jalan keluarnya dan pemecahannya.



### 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan disini bisa kita tunjukkan dalam partisipasi pemilihan umum maupun dalam pelaksanaan pembangunan baik di bidang fisik, di bidang ekonomi, maupun juga di bidang kemasyarakatan.

### 4. Cara Pemerintah Dalam Menumbuhkan Semangat Berdemokrasi Bagi Warganya.

Bahwa pemerintah dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya perlu adanya sosialisasi terhadap warganya.

### 5. Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan-Peraturan Yang Ada.

Pada dasarnya Negara kita ini merupakan Negara hukum jadi semua masyarakatnya harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara kita ini.

### 6. Pelaksanaan HAM.

Pelaksanaan HAM disini yaitu bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apa pun, misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik

atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran, atau status lainnya.

#### 7. Masyarakatnya Hidup Berdampingan Secara Damai.

Bahwasanya masyarakat kita disini kami sadar bahwa negara kita ini Negara demokrasi, Negara kita ini plural banyak keanekaragaman yang jelas Bhineka Tunggal Ika yaitu adanya perbedaan-perbedaan yang ada di Negara kita ini adalah sebuah kekayaan dari pada Negara ini. Jadi kita yakin bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan untuk kita jadikan sebagai suatu perpecahan tetapi perbedaan itu kita maksimalkan kita jadikan suatu kekayaan yang kita miliki dan harus kita jaga, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kita tidak menjadi terpecah belah dan tidak menjadi suatu alasan untuk menyerang baik itu antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ataupun antar agama satu dengan agama yang lain.

#### **B. Saran**

Mengingat sering terjadinya benturan antara umat beragama maupun antar kelompok yang menimbulkan konflik sosial, maka sebaiknya ditingkatkan “ dialog ” antar umat beragama sebagai langkah pertama menuju kerukunan dan perdamaian. Dialog tersebut memerlukan suatu forum pertemuan, berarti perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi yang

disepakati oleh pemuka-pemuka agama atau aliran kepercayaan yang ada di masing-masing wilayah. Seperti adanya “Badan Musyawarah” (*Bamus*), dan di provinsi-provinsi lainnya perlu pula dibentuk forum senada untuk meningkatkan kerukunan umat beragama melalui “*dialog*”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Khairil Umam, 2010. *Seni, Budaya Dan Lingkungan*, C.V. Cendikia Pramuda Insania.
- Budiardjo Miriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta ; Gramedia.
- Depdikbud, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hidayat Komarudin, Azra Azyumardi, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga ; Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; ICCE UIN JAKARTA.
- Hikam, Muhammad As., 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan ke-2, Jakarta ; LP3ES.
- Koenjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Anropologi*, Jakarta ; Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : UI Pers.
- Komarudin, 2007. *Buku Materi Ajar Sosiologi Politik*, Fakultas Ilmu Sosial ; Universitas Negeri Jakarta.
- Madjid, Nurcholis, 2000. “ *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani* ”, dalam *makalah Lokakarya Islam dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia*, kerjasama IRIS Bandung-PPIM Jakarta-The Asia Foundation

Nottingham, K. Elizabeth. 1994. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 1999. *Kamus Sosiologi*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Catatan Lapangan
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2.1 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pondok-  
Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih
- Lampiran 2.2 Wawancara Dengan Suku Betawi
- Lampiran 2.3 Wawancara Dengan Etnik Tionghoa
- Lampiran 2.4 Wawancara Dengan Suku Jawa
- Lampiran 2.5 Wawancara Dengan Suku Sunda
- Lampiran 2.6 Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen
- Lampiran 2.7 Wawancara Dengan Suku Batak
- Lampiran 2.8 Wawancara Dengan Lurah Jatirasa
- Lampiran 2.9 Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam
- Lampiran 2.10 Wawancara Dengan Tokoh Kepemudaan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 Peta Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa-  
Kecamatan Jatiasih
- Lampiran 7 Dokumentasi

### Catatan Lapangan

1. Pada hari senin tanggal 1 Nopember 2010 peneliti mengurus surat permohonan izin penelitian ke kantor BAAK UNJ.
2. Pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2010 peneliti mengambil surat permohonan izin penelitian ke kantor BAAK UNJ.
3. Pada hari jum'at tanggal 19 Nopember 2010 peneliti datang ke kantor Kecamatan Jatiasih menemui Bapak Endang untuk menyampaikan niat peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Disana saya disambut baik dan disuruh menunggu sebentar untuk mengambil surat rekomendasi dan surat pengantar ke Kantor Kelurahan Jatirasa, bahwa saya diperbolehkan untuk melakukan penelitian di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih.
4. Pada hari jum'at tanggal 19 Nopember 2010 jam 17:00 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Warta salah seorang Staff Kelurahan Jatirasa sambil membawa surat rekomendasi dan surat pengantar dari Kantor Kecamatan Jatiasih untuk menyampaikan niat peneliti untuk melakukan penelitian di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih serta menanyakan kepada beliau kapan saya bisa menemui Pak Lurahnya.

5. Pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 15:00 WIB peneliti datang kembali ke rumah Bapak Warta salah seorang Staff Kelurahan Jatirasa untuk menanyakan kepastiannya kapan saya bisa menemui Lurah Jatirasa, di rumah beliau saya di berikan penjelasan bahwa Pak Lurahnya sedang ada rapat dinas ke luar kota dan bisa menemui Pak Lurah sekitar akhir bulan Februari 2011. Selain itu juga saya di kasih tahu beliau untuk menemui tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih siapa-siapa saja orangnya.
6. Pada hari minggu tanggal 21 November 2010 peneliti datang ke rumah salah seorang Tokoh Masyarakat Bapak H. Mustofa dan berhubung pada waktu itu sedang ke luar kota, di sana saya di sambut oleh Pak Jamal salah satu putranya dan rekan kerja ibu saya juga di SDN Jatirasa I. Dan disana saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Jamal tentang maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk mencari informasi tentang keadaan Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini. Menurut beliau nanti saya kasih tahu mas Rizky kalau bapak saya sudah ada di rumah.



7. Pada hari jum'at tanggal 04 Pebruari 2011 saya dapat konfirmasi dari Pak Jamal Putra dari salah seorang tokoh masyarakat Bapak H. Mustofa bahwa Bapak saya sudah ada di rumah mas Rizky dan kapan mau menemuinya, lalu saya kasih tahu ke Pak Jamal hari minggu tanggal 6 Pebruari 2011 saja saya menemui orang tua bapak.
8. Pada hari minggu tanggal 06 Pebruari 2011 peneliti datang ke rumah Bapak H. Mustofa dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
9. Pada hari selasa tanggal 15 Pebruari 2011 jam 11:00 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Marum salah seorang warga Betawi serta rekan kerja ibu saya juga di SDN Jatirasa I.saya datang ke rumah beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
10. Pada hari selasa tanggal 15 Pebruari 2011 jam 16:45 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Ko' Seldy salah seorang etnik Tionghoa dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya, namun saat berbincang-bincang dengan saya ternyata beliau tersebut adalah mantan murid bapak saya waktu di SMP.

11. Pada hari selasa tanggal 15 Pebruari 2011 jam 19:53 WIB peneliti menemui Bapak Surodjo salah seorang warga dari suku jawa dan rekan kerja bapak saya di SMP. Peneliti menemui beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
12. Pada hari selasa tanggal 15 Pebruari 2011 jam 19:53 WIB peneliti menemui Ibu Euis Supiati salah seorang warga dari suku sunda dan rekan kerja bapak saya di SMP. Peneliti menemui beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
13. Pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 saya dapat konfirmasi dari rekan saya Achmad Nur putra Bapak Warta salah seorang Staff Kelurahan Jatirasa, rekan saya waktu di SD dan SMP tersebut kerja di Kelurahan Jatirasa juga dia memberitahukan ke saya bahwa Pak Lurah sudah datang dan kapan mau menemui beliau.
14. Pada hari minggu tanggal 20 Pebruari 2011 jam 20:53 WIB peneliti datang ke rumah salah seorang tokoh Agama Kristen yang bernama Alphon Panjaitan. Peneliti menemui beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.

15. Pada hari minggu tanggal 20 Pebruari 2011 jam 21:10 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Ramli Marpaung salah seorang warga dari suku batak. Peneliti menemui beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
16. Pada hari senin tanggal 21 Pebruari 2011 jam 14:41 WIB peneliti datang ke Kantor Kelurahan Jatirasa bernama Drs. H. Sujito. Peneliti menemui beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
17. Pada hari minggu tanggal 27 Pebruari 2011 jam 16:27 WIB peneliti datang ke rumah Bapak H. Muslih salah seorang Tokoh Agama Islam saya datang ke rumah beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
18. Pada hari minggu tanggal 27 Pebruari 2011 jam 20:00 WIB peneliti datang ke rumah Bapak Asep Saeful Malik salah seorang Tokoh Pemuda serta rekan kerja ibu saya juga di SDN Jatirasa I. saya datang ke rumah beliau dengan membawa surat izin penelitian dari Kecamatan serta menjelaskan maksud dan tujuan saya serta mewawancarainya.
19. Pada hari senin tanggal 01 Maret 2011 saya datang kembali ke kantor Kelurahan Jatirasa dan alhamdulillah Kepala Kelurahan dan para staffnya

ada semua di tempat. Kemudian saya menemui Lurahnya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya telah diberikan izin penelitian di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Kemudian saya di bawa ke ruang sekretaris untuk menunggu. Dan kemudian saya mendapatkan data-data yang kurang mengenai Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih dan diberikan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kelurahan Jatirasa.

## Pedoman Wawancara.

Nama :  
Usia :  
Jabatan :  
Tanggal wawancara :  
Tempat :  
Waktu :  
Pewawancara :  
Alat :

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?
4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ?  
Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

Hasil Wawancara.  
( Tokoh Masyarakat )

Nama : Bapak H. Mustofa.  
Usia : 60 Tahun.  
Jabatan : Tokoh Masyarakat.  
Tanggal wawancara : 06 – 02 – 2011.  
Tempat : Pondok Benda RT 05 / 02 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih  
Kota Bekasi  
Waktu : 12:55 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?

4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya biasanya soal dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu melakukan musyawarah. Kita sebagai tokoh masyarakat diundang dalam pengambilan keputusan tersebut di bawa ke forum untuk dimusyawarahkan dengan masyarakat.
2. Yaitu, kalau perbedaan pendapat di masing-masing di musyawarahkan setelah pendapat itu masing-masing setuju lalu diputuskan nah kalau tidak ada ditunda dulu, setelah ditunda beberapa saat baru ada kesepakatan nah habis itu didiskusikan.
3. Yang jelas begini misalkan dalam rangka kegiatan pemilu dalam setiap anggaran per-TPS di setiap wilayah sekian nah jelas-kah kurang biayanya, misalnya anggaran di setiap per-TPS cuma 300rb kan kurang karena perlu tenda, bangku, dan sebagainya, jadi perlu dana tambahan yang

diambil dari partisipasi masyarakat secara gotong royong di masing-masing di wilayah TPS-nya itu sendiri. Contoh yang lain saja dalam pembangunan jalan atau rumah ibadah nah itu kan sebagian besar dari pemerintah kalau dari masyarakat biasanya tidak ada paling-paling alakadarnya baik berupa memberikan makanan atau minuman karena mereka bekerja di depan rumah kita biasanya pembangunan jalan tersebut dari APBD. Kalau itu yang namanya PNPM yaitu dari masyarakat 30% dan dari pemerintah itu yang 70% gitu. Nah namun PNPM kegiatan tersebut yaitu biasanya perbaikan jalan ya kira-kira 1 meter atau 1,5 meter.

4. Misalnya dalam organisasi Kepemudaan atau Karang Taruna yang jelas untuk bimbingan atau binaan tentu itu dari pemerintah baik itu petunjuk atau arahan. Tanpa adanya bimbingan atau petunjuk dan dukungan dari pemerintah yang namanya Karang Taruna atau Kepemudaan itu-kan untuk menggali potensi yang ada di wilayah itu-kan belum sepenuhnya menguasai jadi perlu adanya bimbingan, penyuluhan, dan petunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kepemudaan maupun Karang Taruna gitu.
5. Yang jelas masyarakat mau tidak mau masyarakatnya mentaati peraturan dan memang mentaati gitu. Masalahnya kalau tidak mentaati aturan daripada pemerintah berarti-kan masyarakatnya kurang atau tidak sadar.



Alhamdulillah untuk di wilayah Jatirasa ini yang di sampaikan oleh pemerintah missal dalam pembayaran PBB, bersih lingkungan atau jum'at bersih itu-kan programnya daripada pemerintah. Nah kecuali itupun kalau dari pemerintah tidak ada, yang jelas wilayah lingkungan di RT atau RW mengadakan gitu. Nah nanti laporannya baru di sampaikan ke pemerintah setempat gitu.

6. Ya memang kalau KDRT gitu ya di wilayah Kelurahan Jatirasa ini kegiatan yang sangat menonjol atau keliatan memang tidak ada. Namun, bila ada keributan sedikit antara tetangga cukup di musyawarahkan baik di tingkat RT atau RW disamping kadang-kadang minta bantuan tokoh masyarakat di lingkungan itu sendiri cukup di musyawarahkan dilingkungan itu sendiri. Untuk pelanggaran HAM yang sangat berat itu belum ada untuk di wilayah Kelurahan Jatirasa ini.
7. Ya kalau menurut saya, yang jelas yang kalau namanya di wilayah perkampungan selalu hidup berdampingan. Sebagai contohnya sekarang...misalkan "nt" sebagai mahasiswa yang misalkan nanyanya di RW 03 asalkan nanya sama orang kampung itu sendiri kecuali sama orang lain belum tentu tahu kalau nanyanya sama orang kampung itu sendiri, nah Ibu atau Bapak gitu saya mau nanya kalau rumahnya Bapak H. Mustofa di mana itu pasti ada yang nasih tahu., "nt-kan" lain RT maupun RWnya juga pasti ada yang ngasih tahu adanya di RT05/02

gitu. Kalau itu nanyanya di kampung insya allah walaupun itu di sini RW02 tapi sayanya tinggalnya di RT05 kalau yang namanya nanya-Nya sama orang kampung itu sendiri yang namanya rumah Bapak H. Mustofa atau saya, itu pasti orang tahu artinya kenapa mereka tahu, karena kita hidup selalu berdampingan, selalu bersilaturahmi gitu, yang jelas karena di perkampungan, kecuali orang kompleks ya, kalau orang kompleks itu-kan berangkat pagi pulang sore kecuali hari minggu gitu itupun kita tidak pernah mendengar ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi selalu apa namanya ada segala-segala atau kekurangan dan kelebihan gitu selalu di musyawarahkan dengan para tetangga terlebih dahulu yang jelas-kan setiap ada hal-hal yang kurang mengenakan kadang-kadang itu-kan selalu dimusyawarahkan itu-kan hidup berdampingan gitu. Masalahnya kalau hidup di perkampungan ini atau di wilayah Kelurahan Jatirasa ini pada khususnya di perkampungan ini yang jelas dengan tetangga atau dengan sesama tetangga tidak berdampingan saya rasa hidupnya tidak merasa nyaman, yang membuat segala hal nyaman itu-kan kita harus baik sesama tetangga..kenapa harus begitu...karena kita harus saling berbagi rasa, berbagi kasih itu-kan seharusnya memang diterapkan untuk hidup berdampingan. Alhamdulillah sementara ini ya masih berdampingan. Walaupun itu orang pendudu baru dari mana-mana walau itu sudah bertetangga diperkampungan sama orang

kampung yang jelas kita harus hidup berdampingan. Contohnya sekarang “nt” orang Kelurahan Jatirasa ya-kan, “nt-kan” yang jelas-kan beda RW sama saya apalagi beda RTnya juga ya tapi-kan kalau bertemu selalu saling menyapa itu yang disebut hidup saling berdampingan.

## Hasil Wawancara.

( Suku Betawi )

Nama : Pak Marum  
Usia : 40 Tahun.  
Jabatan : PNS Guru.  
Tanggal wawancara : 15 – 02 – 2011.  
Tempat : Pondok Benda RT 03 / 01 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih  
Kota Bekasi  
Waktu : 11 : 11 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?

4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya, biasanya dengan melakukan musyawarah misalnya dalam pemilihan Ketua RT/RW.
2. Biasanya dengan cara mengambil suara terbanyak dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan artinya tidak mengatasnamakan kepentingan pribadi atau golongan tetapi mengatasnamakan kepentingan umum.
3. Untuk warga yang saya tahu, untuk warga Rt 03 / 01 kayaknya partisipasinya sangat tinggi dalam hal ini misalnya Pemilu kan saya sendiri pernah menjadi Ketua TPS itu biasanya tidak pernah terjadi hal yang diinginkan, selalu berjalan dengan tertib, aman, dari awal sampai akhir.

4. Ya, karena dulu mungkin kayak ada warga itu diadakan semacam sosialisasi gitu tapi kalau saat ini kayaknya gak pernah.ada sosialisasi-sosialisasi itukan salah satu cara supaya warganya itu tahu akan berdemokrasi. Jadi untuk sekarang ini kayaknya Pemerintah kurang karena bagaimana rakyatnya kurang dalam berdemokrasi sosialisasi dari pemerintah setempat juga tidak ada.
5. Ya, kebanyakan dan sebagian besar lebih mentaati peraturan-peraturan yang ada. Contohnya; dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak kendaraan Bermotor. Biasanya rakyat lebih takut dengan peraturan pemerintah, berarti dia mentaati peraturan.
6. Biasanya memang sudah pasti melibatkan RT setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ya, kalau misalnya tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan biasanya ya mungkin kalau ada masalah HAM berat seperti konflik antar masyarakat atau rumah tangga dilaporkan ke yang berwajib misalnya polisi atau ke yang biasa menangani hal tersebut. Jadi, warganya yang pasti menangani masalah tersebut ke tingkat RT dan tokoh masyarakat setempat.
7. Umumnya di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini khususnya di Rt03/01 yang saya tinggal ini, warganya hidup berdampingan. Contohnya umat Islam dan Kristen ya saling

menghormati, saling menghargai, begitupun antar suku bangsa juga, baik suku sunda, batak, padang, jawa dan yang lebih dominant disini adalah suku betawi sebagian besar saling menghormati dan menghargai serta tidak saling bermusuhan.

## Hasil Wawancara.

( Etnik Tionghoa )

Nama : Bapak Ko' Seldy.  
Usia : 30 Tahun.  
Jabatan : Pegawai Swasta di Kawasan Lippo Cikarang.  
Tanggal wawancara : 15 – 02 – 2011.  
Tempat : Pondok Benda RT 07 / 03 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih  
Kota Bekasi.  
Waktu : 16:45 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?



4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya pasti setiap pengambilan keputusan di wilayah Kelurahan Jatirasa ini selalu ada musyawarah, ya kita sebagai warga disini atau sekitar sebagai warga etnik di undang untuk mengambil keputusan, misalnya dalam arti kegiatan Posyandu atau misalnya kegiatan warga seperti Gotong Royong itu-kan setiap warga pasti di libatkan.
2. Kalau kita bicara berdasarkan mayoritas Etnik Tionghoa di wilayah Kelurahan Jatirasa ini kalau misalnya terjadi pendapat-pendapat yang berbeda yang pasti karena kita sudah dikenal bukan hanya dari satu generasi tetapi mungkin dari beberapa generasi . Ya jadi bisa dirembukkan dari dusun dan RT atau RW setempat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya mungkin selama umur saya 30 tahun sekarang

ini tidak ada jadi masalah selama di dikusikan. Jadi intinya sudah tidak ada batasan antara masyarakat asli, pendatang, ataupun masyarakat etnik walaupun sudah berpuluh-puluh tahun.

3. Kalau masalah pemilu ya pasti hak kita sama tidak ada perbedaan, baik itu dalam masalah pendataan sampe kita melakukan pemilihan, bahkan hal ini beberapa Etnis Tionghoa ini kita dilibatkan dalam artian sebagai pengurus TPS. Sebagian kasus lain dalam pembangunan sarana dan prasarana entah itu pembangunan jalan kalau kita lihat banyak di pinggir-pinggir jalan ini saudara-saudara kita dari Etnis Tionghoa juga. Jadi, semuanya terbukalah tidak ada masalah dalam mengambil setiap sistem keputusan pemerintah.
4. Untuk masyarakat khususnya di wilayah Pondok Benda Jatirasa ini untuk menumbuhkan semangat demokrasi disini ya kita biasa seperti di RT07/03 selalu melakukan kerja bakti atau misalnya ada kegiatan Posyandu, contoh sekecilnya kalau ada gotong royong biasanya masyarakat melakukan kegiatan tersebut sebulan dua kali kita bersih-bersih di lingkungan RT07/03 atau khususnya lagi seperti kegiatan Posyandu salah satu kegiatan demokrasi tidak ada perbedaan gitu..jadi berarti terbukalah.
5. Kalau peraturan yang ada disini kita-kan mentaati peraturanlah. Ya rasanya ataupun peraturan yang ada disini bukan hanya orang etnik

saja ya tapi untuk warga masyarakat semuanya. Jadi semua peraturan yang ada kita taati untuk seluruh masyarakat yang ada. Jadi, kita tidak merasa lebih atau lebih merasa segalanya tidak seperti itu. Jadi peraturan yang ada kita harus mentaati yang pasti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita harus ikutin dan kalau bisa kita memberikan sumbang sih saran.

6. Untuk masalah HAM disini khususnya di wilayah Jatirasa Pondok Benda yang saya perhatikan seperti KDRT, adapun ada beberapa masalah-masalah kecil seperti keributan-keributan kecil seperti masalah rumah tangga itu diselesaikan melalui tokoh masyarakat setempat atau lebih simpelnya agar masalah tersebut jangan sampe meluas tapi biasanya permasalahannya dipecahkan sampe ditingkat tokoh agama saja atau misalnya orang yang dituakan disini siapa sih. Untuk konflik agama tidak ada, mungkin 20 tahun yang lalu mungkin ada, untuk saat ini tidak ada konflik yang sangat besar.
7. Kalau yang saya tahu mungkin yang saya bilang tadi damai ya sangat damai di RT07/03 ini di desa Jatirasa kampung Pondok Benda ini ya, ya bagaiman tidak damai yang pasti kita bisa terlihat dari kanan-kiri yang saya bilang tadi tidak terjadi kerusuhan sama sekali disini artinya tidak membatasi bahwa disini dia etnis atau suku ini tidak ada disini, ya emang mungkin nenek moyang kita asal muasal dari sekitar sini atau

Bekasi juga. Jadi pada dasarnya ada keterbukaan antara mayoritas etnis, antar suku, dan warga sekitarnya. Jadi intinya adanya keterbukaanlah dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi intinya tidak ada yang jadi masalah..damailah sampai seumur saya 30 tahun ini merasa damai. Jadi sangat bersyukurlah untuk masyarakat Bekasi ini. Untuk konflik itu biasanya-kan terjadi karena memang mereka biasanya pendatang karena mereka ingin lebih dominan, ya kita seharusnya harus mau sadarlah bahwa karena kita salah satu warga etnik atau pendatang yang mau sadar dan tidak mau dominan dan mau berbaur dengan masyarakat disekitarnya, itulah mungkin kendalanya.

## Hasil Wawancara.

( Suku Jawa )

Nama : Bapak Surodjo.  
Usia : 62 Tahun.  
Jabatan : Pensiunan Guru.  
Tanggal wawancara : 15 – 02 – 2011.  
Tempat : Perum. Pondok Gede Permai, JL. Sunan Giri Blok  
E36/5 RT 03 / 012 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih  
Kota Bekasi.  
Waktu : 19:53 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?
4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya terimakasih...selalu mengambil keputusan dalam suatu musyawarah.
2. Ya terimakasih...Biasanya harus dilakukan secara musyawarah agar suatu perbedaan pendapat tersebut yang ada agar bisa di carikan solusinya karena perbedaan pendapat itu merupakan suatu kebhinekaan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebagai warga yang baik ikut aktif dalam kegiatan partisipasi pemerintah baik itu dalam hal pemilu maupun dalam pembangunan-pembangunan juga untuk kepentingan umum melalui kontak musyawarah akalu ada pembiayaan bisa dilakukan dengan cara bergotong royong atau swadaya dari warga sekitar.

4. Ya terima kasih..., pemerintah dalam memberikan sosialisasi demokrasi kepada warganya. contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan umum, pemilihan RT atau RW sebelumnya ada sosialisasi dan mentaati aturan-aturan yang dalam kehidupan berdemokrasi itu sendiri. Jadi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah setempat baik itu dari Lurah bahwa dalam demokrasi dan setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan demikian juga harus melalui suatu pemilihan dari rakyat...oleh rakyat...dan untuk rakyat yang di selenggarakan oleh pemerintah secara nasional yang diadakan 5 tahun sekali demikian juga pemilihan Kepala Daerah baik kota ataupun sebagainya.
5. Ya terima kasih..., dalam peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintah Kelurahan Jatirasa masyarakatnya selalu mentaati daripada peraturan yang berlaku. Contohnya seseorang yang telah berumur 17 tahun harus memohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Ya terima kasih..., untuk pelaksanaan HAM yang ada di Kelurahan Jatirasa ini berjalan dengan baik sesuai dengan HAM yang ada di Negara kita, dimana dari adanya suku-suku yang mempunyai budaya yang bermacam-macam baik suku Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya.
7. Ya terima kasih..., masyarakatnya selalu hidup berdampingan tidak saling terjadi perselisihan ataupun pertengkaran walaupun terdiri dari

berbagai etnis namun tetap hidup rukun dan damai. Contohnya pada masyarakatnya selalu bergotong royong dalam kebersihan lingkungan maupun suatu kegiatan lainnya dalam bertetangga.



## Hasil Wawancara.

( Suku Sunda )

Nama : Ibu Euis Supiati.  
Usia : 55 Tahun.  
Jabatan : Guru SMP.  
Tanggal wawancara : 15 – 02 – 2011.  
Tempat : Perum. Pondok Gede Permai, JL. Sunan Giri Blok  
E36/5 RT 03 / 012 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih  
Kota Bekasi.  
Waktu : 19:53 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?
4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Muhun, di dieu alhamdulillah masyarakatna guyup sok ngayakeun kaputusan anu bisa di pahami kumasyarakat.
2. Muhun sok aya wae, tapi tiasa di reda ku pamingpin RT satempat nyaeta urang musyawarahkeun dina hal perbedaan pendapat tapi tiasa di atasi. Alhamdulillah teu aya pacekcokan atau papasean antara warga.
3. Aya, Upamina teh dalam nyumbang ka masjid, nyumbang jalan anu di lewatan ku pihak masyarakat satempat, alhamdulillah sae dina ririungan baik dalam pembangunan jalan atanapi paguyuban, nyumbang kanggo kapentingan masyarakat di desa Jatirasa, pajak oge sae. Upami untuk pemilu sae oge, guyup, aman teu aya pacekcokan sama sakali alhamdulillah tiasa di atasi.

4. Upami dina demokrasi mah eta tergantung ku masing-masing pendapat, teu aya pacekcokan, teu aya saling menghina atanapi ngabedakeun agama, suku, atau etnik sadayana sami teu aya parberdaan tergantung pendapat masing-masing sareng ngahargaan pendapat anu sanes oge.
5. nya masyarakat di dieu taat kanu paraturab pamarentah, kana paraturan RT, taat kana paraturan-paraturan anu di larang ku hukum sareng di dieu warga tiasa di atur ku sesepuh atanapi ku RT satempat.
6. Alhamdulillah di desa Jatirasa aman, saling menghormati, saling menghargai dina parbedaan agama, suku, etnik atanapi dina parbedaan pendapat sok ngahargai kana pendapat anu sanes, teu aya pacekcokan, teu aya kaributan. Alhamdulillah rukun walaupun berbeda agama, suku, maupun etnik.
7. Alhamdulillah di dieu warga rukun teu aya pacekcokan sama sakali, rukun-rukun saling membantu, saling bahu-membahu. Pokokna di dieu rukunlah sadayana. Warga teu aya anu ka pikakeseleun atanapi teu aya anu rebut di dieu. Alhamdulillah warga sadayana tiasa diatur sareng tatanggi. Sok bantu ngabantu upami mun aya habait atanapi aya hajatan saling bantulah sareng warga nu aya di wilayah Desa Jatirasa ieu.

## Hasil Wawancara.

( Panatua atau Tokoh Agama Kristen )

Nama : Alphon Panjaitan.  
Usia : 52 Tahun.  
Jabatan : TU di SMP 137 Jakarta sekaligus Panatua di GBI  
JL. Pahlawan Revolusi Pondok Bambu dan GBI  
Jatiasih.  
Tanggal wawancara : 20 – 02 – 2011.  
Tempat : Perum. Pondok Gede Permai Blok C4/60 Kel. Jatirasa  
Kec. Jatiasih Kota Bekasi.  
Waktu : 20:53 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?

2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?
4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya kalau saya kiranya untuk di wilayah Jatiasih ini ya melakukan suatu musyawarah dalam pengambilan keputusan saya kira belum sepenuhnya ya-lah. Untuk di RT kita ini-lah tidak terjadi masalah, kenapa saya bilang begitu karena di wilayah daripada Jatiasih ini ya masih ada antara agama yang satu dengan agama yang lainnya tidak ada kebebasan seperti contohnya di daerah Komsen sana bahwa untuk beribadah disana masih tidak bisa, masih ada berupa laranganlah, kalau di Perumahan Pondok Gede Permai juga tidak ada masalah di kompleks ini selaku kita minoritas orang Batak dan ada perkumpulan atau

pertemuan setiap awal atau akhir bulan masih bisa beribadah tidak ada larangan sama sekali kalau di tempat lain seperti di Wilayah Jatiasih di Komsen sana ternyata sampai sekarang ngangkat satu pujian saja tidak bisa tapi hanya sebagian saja itu, untuk melakukan suatu musyawarah itu sebenarnya perlu diambil baik antara ya antara ya masyarakat pendatang ataupun suku bangsa ataupun orang perantaulah ya untuk ada musyawarah dengan penduduk asli yang di sini yang saya kira belum samapi sana ya untuk mengambil suatu keputusan itu mesti ada kerjasamalah kadang antara RT dengan RW, dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya supaya tidak terjadi antara saling inilah ataupun saling kecemburuan.

2. Bila terjadi perbedaan pendapat itu ya memang selalu ada perbedaan pendapat ya dan setiap dalam perkumpulan pada masyarakat. Karena setiap perbedaan pendapat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengacu kepada tujuan yang baik-lah. Bukan karena ada suatu perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi suatu jurang pemisah, karena dalam suatu rapat istilahnya kita ada suatu perbedaan-perbedaan pendapat tetapi tujuannya nanti finisnya akan menjadi baik. Jadi ini-lah yang perlu kita bina samapi sekarang ini antara masyarakat kita bersama yang ada di wilayah Jatiasih ini ya dengan masyarakat setempat ataupun masyarakat majemuk kita harus ada ya kontak sama mereka atau

menjalin hubungan sama mereka supaya lewat perbedaan pendapat ini dengan mereka agar terjadi suatu keakuran ataupun suatu musyawarah yang menimbulkan ya suatu pendapat yang mengacu kepada ya supaya tidak terjadilah ya diantara mayoritas dengan minoritas itu ya suatu ganjaran bagi yang minoritas untuk majunya ke sana. Tapi yang saya lihat sekarang ini pendapat itu belum sepenuhnya bisa di tampung ya umpamanya pendapat kita kepada pemerintah setempat belum saya kira sampai di sana ya, apalagi yang saya bilang itu ya untuk minoritas ya kadang masih sulit.

3. Kalau masalah partisipasi ya-lah masyarakat dalam pemerintah saya kira kita harus berpartisipasi ya-lah. Masyarakat ini untuk mendukung pemerintah ini supaya pemerintah kita ini ya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan penataan di dalam pemerintah setempat itupun ke depan juga lebih baik lagi ya, supaya lewat ya partisipasi masyarakat, tanpa ada partisipasi dari masyarakat mendukung pemerintah... pemerintah tidak akan maju...tidak akan maju, tapi kalau ada partisipasi dari masyarakat untuk mendukung dari pada pemerintah. Contohnya dalam mendukung RT-lah maka dari itu-kan RT ini-kan pemerintah terendahlah., jadi kita harus dukung dia-lah supaya maju, jangan selalu kita ya tidak dukung apa partisipasi yang ada di kita..kita berikan-lah agar maju, itu yang kita bisa berikan kepada pmerintah. Contohnya saja

dalam pemilihan umum mari kita laksanakan pemilihan umum dengan sebaik-baiknya. Hak kita itu kita berikan jangan sampai hak kita itu hilang, kadang-kadang ada masyarakat ya tidak mendukung dari pada pemerintah, contohnya dalam pemilihan-pemilihan Walikota, pemilihan Kepala Daerah ah...ngapain lagi itu dipilih berarti itu tidak mendukung dari pada program pemerintah itu berarti dia sudah ya menyalahkan pemerintah itu sendiri, belum dia lakukan sudah ada praduka yang tidak bagus dalam dirinya tentang pemerintah padahal perlu kita dukung dulu baru nanti kita lihat kedepannya dulu apa pekerjaan dari pemerintah, apa motivasi pemerintah untuk masyarakat ke depannya. Jadi perlu ada dukungan kepada pemerintah.

4. Jadi saya kira kalau bagi saya, kalau bagi cara pemerintah dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi kalau saya kira di Jatiasih ini cara berdemokrasi dari pada pemerintah itu baik itu lewat Kelurahan masih sangat kurang ya yang saya lihat ya apalagi melalui Kelurahan kepada RW-lah dan dari RW di menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya itu-lah cara berdemokrasi yang baik saya kira, tapi yang saya lihat di wilayah Jatiasih ini cara berdemokrasinya masih jauh-lah..kurang bagus-lah dalam berdemokrasinya.



5. Kalau masalah peraturan yang ada di wilayah Kecamatan Jatiasih atau Kelurahan Jatirasa ini. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan baik. Ataupun kalau dulu masyarakat yang kerja di DKI sekalipun dia tinggalnya di Bekasi tapi KTPnya DKI tapi dia tinggalnya di sini tapi sekarang ini saya lihat sudah ada perubahan yang sangat radikal ya enggak lagi, contohnya lagi ya Pak Sihombing yang bekerja di Kelurahan di wilayah DKI dia sudah tidak punya KTP DKI lagi walau dia bekerja di DKI berarti dia mentaati peraturan-peraturan di daerah itu-kan, itu-kan peraturan daerah jadi dimana kita tinggal ya harus ada surat legalitas kita agar tidak semeraut.
6. Kayaknya kalau HAM di Wilayah ini belum sebegitu penuhnya. Ya contohnya sampai sekarang ini kayak yang tadi itu-lah HAM belum ada kebebasan untuk memilih. Contohnya masih ada gangguan-gangguan kecil-lah ya seperti yang tadi...contohnya dulu ya kita di sini pernah mau membangun suatu rumah ibadah hokomene sampe sekarang ini dari pada HAM itu belum terlaksana karena sebagian dari mereka menolak kehadiran dari pada tempat ibadah itu. Kayak Contohnya juga pembangunan Gereja HKBP di sana sampai sekarang mereka membangun ya untuk tempat dari pada sekolah minggu tidak bisa melebihi dari pada tinggi rumah mereka berarti itu tidak ada hak kebebasan padahal HAM itu-kan Hak Asasi Manusia ya jadi perlu ini

sebenarnya Hak Asasi Manusia ini perlu ini sebenarnya di terapkan di wilayah ini supaya lewat tadi yang saya bilang itu ya perbedaan suku itu jangan menimbulkan ya hak itu terhalang, itu-lah yang terjadi sampai sekarang ini yang saya lihat...Hak Asasi Manusia.

7. Kalau di sini di Jatiasih saya kira untuk masalah-masalah masyarakat hidup berdampingan ya masih berdampingan belum pernah bentrok tapi ya kalau tahun-tahun yang lalu pernah bentrok tetapi sesudah dari situ karena sudah ada perjanjian untuk hidup berdampingan dan damai antara suku yang satu dengan suku yang lain tidak ada pernah terjadi lagi konflik di sini sampe sekarang tetap ko' rukun-rukun ya yang saya lihat ya di wilayah sini tapi enggak tahu ya kalau untuk di wilayah yang lain tapi untuk di wilayah Kecamatan Jatiasih ini dan sekitarnya ya belum ada konflik antara warga dengan warga yang lainnnya seperti yang terjadi di tempat-tempat yang lain masih hidup berdampingan, contohnya kita baru pulang dari sana-pun ya tidak ada pernah ada gangguan selalu ya ada jaminan keamanan-lah sampe sekarang ini sampe jam berapa-pun pulang juga tidak pernah ada gangguan.

## Hasil Wawancara.

( Suku Batak )

Nama : Ramli Marpaung.  
Usia : 48 Tahun.  
Jabatan : Wiraswasta.  
Tanggal wawancara : 20 – 02 – 2011.  
Tempat : Perum. Pondok Gede Permai Blok C4/31 Kel. Jatirasa  
Kec. Jatiasih Kota Bekasi.  
Waktu : 21:10 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?

4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya, betul suatu masalah perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu.
2. Ya, kalau ada perbedaan pendapat di kemudian hari perlu di musyawarahkan.
3. Ya, selalu mendukung program pemerintah. Contohnya dalam kegiatan gotong royong atau-pun pemilu, masyarakat di sini selalu berpartisipasi apa yang dilakukan dari program pemerintah.
4. Ya, untuk dari RT/RW setempat atau dari Kelurahan sendiri selalu ada dalam kegiatan sosialisasi dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi.
5. Untuk di wilayah Kelurahan Jatirasa ini selalu mentaati peraturan yang berlaku.

6. Untuk Hak Asasi Manusia ini di sini jarang pernah terjadi..masih aman-aman saja.
7. Kalau di sini antar umat beragama masih banyak bertoleransi...masih aman-aman saja, selalu mengerti satu sama lain, termasuk kebaktian juga bebas di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini.

## Hasil Wawancara.

( Lurah Jatirasa )

Nama : Drs. H. Sujito.  
Usia : 55 Tahun.  
Jabatan : Lurah Jatirasa.  
Tanggal wawancara : 21 – 02 – 2011.  
Tempat : Kantor Kelurahan Jatirasa.  
Waktu : 14 : 41 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?

4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban.**

1. Semua warga Jatirasa dalam hal ini pengambilan keputusan pada umumnya selalu mengadakan musyawarah misalnya dalam hal pemilihan RT atau RW sesuai dengan peraturan perda No 125 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pemilu berdasarkan asas demokrasi namun dalam pembentukan ini yang pertama pembentukan panitia melalui musyawarah kemudian panitia mempunyai tugas dengan hal yang berkaitan hal tersebut ,menentukan calon - calonnya yang akan di pilih terus juga salah satunya adanya mendatangkan warga dilakukan secara demokrasi. Kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang ada misalnya gorong-gorong rusak dilakukan secara musrawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan adanya pengumpulan dana dari swadaya masyarakat.

2. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat karena di wilayah kita ini berbeda suku bangsa dan agama artinya itu tadi kita undang tokoh - tokohnya terutama RT atau RW, tokoh masyarakat yang ada, tokoh dari perwakilan tokoh agama islam ataupun tokoh agama yang lain, baik Kristen atau Katolik atau yang lain ataupun tokoh adat setempat terus kita kumpulkan di sebuah forum, apa sih sebetulnya permasalahannya lalu dijelaskan dalam musyawarah bagaimana supaya perbedaan yang ada tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tetap melibatkan RT atau RW dan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Jadi kita tidak terlepas dari musyawarah, karena kita dengan musyawarah dan melibatkan tokoh-tokoh yang ada disekitarnya kita bahas bersama dan di cari jalan keluarnya dan pemecahannya. Insya allah akan berjalan dengan aman, damai, dan tertib.
3. Kalau masalah pembangunan pada khususnya ada. Kalau masalah pembangunan itu pasti ada perencanaan pembengunan yang terdapat di pemerintah yaitu semacam pelaksanaan perencanaan pembangunan selalu mengadakan pelaksanaan perencanaan masyarakat pembangunan yang diadakan setiap setahun sekali. Jadi kita merencanakan pembangunan setahun mendatang, ini kita libatkan yaitu disini LKMD kalau sekarang LPM, Tokoh-Tokoh Masyarakat, RT atau RW maupun lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan kita bahas pelaksanaan pembangunannya



baik dibidang fisik, dibidang ekonomi, maupun juga dibidang kemasyarakatan. Nah ini juga kita undang daripada para tokoh ahli dan melakukan pengarahannya. Nah hasilnya itu kita bawa ke tingkat Kecamatan, nah nanti dari tingkat Kecamatan kita bahas lagi lalu di kirimkan lagi ke tingkat kota untuk dibahas lagi. Nah jadi masyarakat disini kita tetap kita berdayakan baik dibidang perencanaan pelaksanaan umum, yaitu guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk berkaitan Pemilu alhamdulillah partisipasi masyarakatnya sangat bagus karena mereka mempunyai sebagai kewarganegaraan yang baik, sebagai warganya yang baik mempunyai hak untuk mengeluarkan suaranya bukan hanya pada pemilu nasional tapi dalam pemilu Pilkada baik Pilkada Tingkat II atau Tingkat I alhamdulillah untuk warga di wilayah Jatirasa ini partisipasi masyarakatnya sangat bagus.

4. Yang berkaitan dengan cara kita untuk menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warga kita sudah tentu kita sampaikan melalui rapat-rapat minggon (*mingguan*) di tingkat Kelurahan. Bila ada setiap kesempatan apabila ada undangan dari setiap masyarakat, kita memberikan semangat untuk berdemokrasi ini kita contohkan saja di samping setiap pemilihan RT atau RW sekarang sudah dilaksanakan secara demokrasi, nah jadi masyarakat bebas memilih untuk menentukan pendapatnya untuk memilih siapa., tidak ada tekanan dari pihak manapun

satu orang satu suara. Jadi kita berikan kebebasan siapakah yang akan dipilih itulah hasil yang dipilih oleh masyarakat tersebut. Jadi sekarang budaya demokrasi di wilayah Kelurahan Jatirasa ini- sudah cukup bagus untuk selanjut-selanjutnya agar budaya demokrasi di wilayah Jatirasa ini tetap di pertahankan budaya demokrasi yang sudah ada di wilayah ini.

5. Ya kalau yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku pada keseluruhan sudah tentu ada yang taat dan ada juga tidak taat, yang berkaitan ini, contohnya saja; partisipasi masyarakat dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itukan harus ada SPPTnya terlebih dulu dan kita kalau ada laporan PBB dari Kecamatan kita sampaikan kepada warga kita melalui RW dan RT setelah sampai kepada wajib pajak atau masyarakat kita harapkan warga membayar kepada pihak-pihak Bank yang ditunjuk, misalnya; BRI, Bank JABAR, MANDIRI, BCA, dan sebagainya. Memang sih warga ada saja satu atau dua orang yang bandel tapi oleh kita berikan motivasi dengan harapan PAD kita itu bisa tercapai yang khususnya berkaitan dengan pembangunan daerah.
6. Untuk pelaksanaan yang terkait HAM di wilayah Kelurahan Jatirasa ini sih saya anggap untuk saat ini sudah cukup baik, memang sih tadinya gejala pernah juga ada berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama karena di wilayah kita-kan disini disamping masyarakat mayoritasnya agama muslim tapi ada juga non-muslim dan juga ada

disamping Masjid ada Gereja, disini juga didaerah kita ada 3 buah Gereja berarti warga non-muslim ada juga. Maka dengan hal ini ada kebebasan, tapi dengan kepedulian kita ya kita undang baik tokoh-tokoh muslim dan juga beberapa tokoh non-muslim, tokoh-tokoh masyarakat setempat dan kita berikan penjelasan dan pengertian kepada warganya bahwa kita hidup bermasyarakat harus hidup rukun dan berdampingan maka akhirnya mereka mengerti. Karena agama apapun mengajarkan kepada umatnya agar berbuat positif dan berbuat hal yang baik antara sesama umatnya walaupun disini ada 3 buah Gereja dan Masjid masih baik-baik saja dan tidak ada gejolak yang menonjol sampai saat ini.

7. Kalau kita lihat dan apa yang dijelaskan saya seperti tadi. Seperti contohnya di wilayah kita ini terdapat HKBP dan ada Masjid, alhamdulillah selama saya disini dua tahun masih rukun-rukun saja, contoh lainnya saja di Rt 04/04 dekat rumah ustajah Rohayati di sebelahnyanya juga ada Gereja ternyata masing-masing berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing, adanya Mushola..Masjid..Ustad..tokoh agama..Maj'lis Ta'lim untuk membina umatnya begitu juga dengan Gereja dan pemuka Agama Non-Muslim juga untuk membina umatnya dengan baik. Nah sebelah kanan kantor Kelurahan kita juga disini ya ada Gereja dan di sebelahnyanya juga ada Mushola dan Masjid tapi alhamdulillah kehidupan bermasyarakatnya di

wilayah kita ini hidup aman-aman saja berarti di wilayah kita ini boleh dikatakan alhamdulillah masyarakat kita masih selalu menjaga rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa, Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa baik dalam agama, dalam ukhuwah islamiyah, dalam bermasyarakat. Jadi masih rukun-rukun saja sampai saat ini.

Hasil Wawancara.  
(Tokoh Agama Islam)

Nama : Bapak H. Muslih  
Usia : 41 Tahun.  
Jabatan : Tokoh Agama.  
Tanggal wawancara : 27 – 02 – 2011.  
Tempat : Pondok Benda RT10/03 No. 46 Kel. Jatirasa Kec.  
Jatiasih Kota Bekasi.  
Waktu : 16:27 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?

4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/ yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Bismillahirohmannirrohim, masyarakat di sini selalu di arahkan oleh tokoh agama atau masyarakat untuk melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga masyarakat selalu hidup rukun dan berdampingan.
2. Kami selaku tokoh Agama selalu mengadakan pendekatan dengan mereka yang mengerti perbedaan pendapat, walaupun berbeda agama maupun suku sehingga hidup damai dan berdampingan.
3. Untuk masyarakat di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih pada khususnya selalu memberikan dukungan kepada pemerintah dan selalu menyiapkan sarana dan prasarana sehingga di sini hubungan antara masyarakatnya sangat baik.

4. Selalu pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam perpajakan, baik dalam pemilu atau dalam politik selalu memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.
5. Masyarakat muslim pada khususnya ya selalu mentaati peraturan pemerintah, karena tokoh agama selalu mengajarkan hidup itu harus taat kepada Allah, kepada Rosul, dan harus juga mengikuti ajakan-ajakan dari pemerintah, itu sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an.
6. Untuk di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini, pelaksanaan HAM sangat baik dan tidak ada yang namanya HAM yang berat, karena masyarakatnya sudah pada mengerti karena selalu taat mengikuti pengajian...ya sehingga apa yang di jelaskan oleh tokoh agama atau para ustatnya para masyarakatnya untuk menjauhi dari pada tindak kekerasan.
7. Untuk di wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih ini, alhamdulillah masyarakatnya selalu mengerti hidup berdamai dan berdampingan walaupun lain suku, lain agama tapi yang namanya berbeda agama walaupun bukan non-muslim tapi dia selalu hidup berdampingan dan hidup berdamai, sehingga tidak menimbulkan suatu kesatuan masyarakat yang harmonis tidak ada kekerasan dan jauh dari pada tindakan-tindakan anarkis.

Hasil Wawancara.  
(Tokoh Kepemudaan)

Nama : Bapak Asep Saeful Malik.  
Usia : 30 Tahun.  
Jabatan : Guru.  
Tanggal wawancara : 27 – 02 – 2011.  
Tempat : Pondok Benda RT 02 / 02 No. 23 Kel. Jatirasa  
Kec. Jatiasih Kota Bekasi.  
Waktu : 20:20 WIB.  
Pewawancara : Rizky Agusetiawan.  
Alat : Perekam.

Pokok-Pokok Materi Yang Di Wawancara :

1. Apakah masyarakat di wilayah ini melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan ?
2. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat pada masyarakat yang plural ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ?



4. Bagaimana cara pemerintah menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya ?
5. Apakah masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku/yang ada ?  
Jelaskan !
6. Bagaimana pelaksanaan HAM di wilayah ini ? Jelaskan !
7. Apakah masyarakat hidup berdampingan secara damai di wilayah ini ?  
Jelaskan !

**Jawaban :**

1. Ya, alhamdulillah di wilayah kita setiap mengambil keputusan tidak di ambil secara individual tetapi secara musyawarah, karena sesuai dengan ajaran yang sudah di ajarkan oleh Rosulullah S.A.W. setiap yang akan mengambil suatu keputusan harus dirundingkan dan diambil keputusan secara bersama begitu.
2. Masyarakat Plural itu-kan kalau Plural itu-kan berarti banyak, entah itu dari segi pemikirannya, segi keyakinan ataupun budaya di gabungkan menjadi satu. Nah itu pasti ada perbedaan di sana...ya pasti ada perbedaan di antara masyarakat plural itu. Nah, ketika ada terjadi perbedaan atau tidak ada keseimbangan pemikiran baik budaya ataupun keyakinan, maka masyarakat yang terjadi di wilayah ini, kita melakukan

apa yang namanya berkumpul untuk mengambil suatu keputusan bersama. Jadi tidak dengan cara-cara anarkis dan agar terhindar demi cara-cara yang brutal seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat di daerah-daerah banyak sekali kejadian-kejadian terutama dalam hal beda keyakinan dalam hal ini. Jadi untuk itu di wilayah kita sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang merusak kerukunan antar warga baik yang berbeda keyakinan, beda agama, beda pemikiran, ataupun beda kebudayaan maka kita coba kita jalin bersama di sini dengan cara saling menghormati antara satu warga atau satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dari pada warga itu sendiri atau merusak dari pada lingkungan yang kita tempati ini seperti itu.

3. Ya untuk masyarakat di wilayah kita alhamdulillah kami ya sadar bahwa pada dasarnya ini tempat adalah rumah kami, kita tinggal di sini, kita berusaha di sini, kita hidup di sini tentunya kita ingin merasakan suasana yang nyaman, damai dan tentram. Oleh karena itu, alhamdulillah untuk masyarakat di lingkungan ini ada atau ikut berpartisipasi dalam pemerintahan misalnya dalam bergotong royong atau sama-sama membersihkan jalan kita untuk kenyamanan kita semua seperti gotong royong kerjasama untuk pembangunan jalan misalkan ngecor gitu-kan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di wilayah kita berjalan itu semua,

karena kita merasa itu adalah tempat kita, ini adalah rumah kita yang harus kita jaga dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

4. Untuk pemerintah dalam menumbuhkan semangat berdemokrasi bagi warganya, saya kira ada, misalnya seperti dalam hal pemilu itu ada. Jadi untuk kita berdemokrasi dari pemerintah pasti ada, baik itu himbauan-himbauan ataupun mungkin ajakan-ajakan dari pemerintah supaya kita bisa hidup atau bisa menumbuhkan rasa demokrasi dalam diri kita, sehingga warga kita ini mengerti dan tahu apa itu berdemokrasi dan mau menjalankan demokrasi yang ada di Negara kita ini.
5. Kalau masalah mentaati mungkin itu tergantung dari individunya sendiri, ya jadi untuk saya pribadi...mungkin ya kalau untuk sampel saja ya. Alhamdulillah kami ya yang saya tahu dan lingkungan sini dari keluarga kami seperti PBB alhamdulillah setiap tahun itu kita tepati, kita bayar, kita lunasi PBBnya atau mungkin untuk kendaraan juga ya, ya kita juga bisa bayar setiap tahunnya. Ya alhamdulillah jadi warga di sini taat pajak... insya Allah.
6. Alhamdulillah untuk sejauh ini belum ada untuk pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu, untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu belum ada laporan-laporan, tapi kemaren sempat ada sedikit apa ya istilahnya gesekan antara warga di wilayah ini, tapi alhamdulillah bisa di atasi dengan cara damai. Jadi di bawa ke balai RW dan kemudian di

damaikan di situ dan alhamdulillah tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak merugikan kedua belah pihak atau warga itu sendiri. Ada atau tidak dari tokoh masyarakat atau pemerintah setempat yang turun gitu? Ya ada dari RW itu sendiri.

7. Alhamdulillah untuk masyarakat kita di sini kami sadar bahwasanya Negara kita ini Negara berdemokrasi, Negara ini plural banyak keanekaragaman yang jelas Bhineka Tunggal Ika itu, tapi alhamdulillah dari perbedaan-perbedaan yang ada kita menyikapinya dengan secara baik, karena kita tahu bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah kekayaan dari pada Negara ini. Jadi kita yakin bahwasanya perbedaan-perbedaan itu bukan untuk kita jadikan sebagai suatu perpecahan, tapi perbedaan itu kita maksimalkan, kita jadikan untuk menjadi suatu apa namanya suatu kekayaan yang kita miliki dan harus kita jaga, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kita tidak menjadi terpecah belah, tidak menjadi alasan untuk apa namanya menyerang antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, karena kita yakin dari perbedaan ini kata Nabi “ *ukhtilaful rohmatun* ”...jadi perbedaan yang ada itu adalah rahmat dan kasih sayang...jadi kita tahu. Jadi dengan plural ini bukan untuk menjadi kita terpecah belah seperti itu.



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

---

---

Nomor : 4999/H39.12/PL/2010  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

4 November 2010

Yth. **Camat Jatiasih**  
Di Tempat

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Rizky Agusetiawan**  
Nomor Registrasi : 4115051871  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik  
Untuk mengadakan : Penelitian untuk Skripsi

Di : **Wilayah Pondok Benda, Kec. Jatiasih**

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :  
***"Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural (Studi Deskriptif di Wilayah Pondok Benda Kec. Jatiasih)."***

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan Ilmu Sosial Politik

Kepala Biro Administrasi  
Akademik dan Kemahasiswaan



Dra. Desfrina  
NIP. 19590409 198503 2 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**KECAMATAN JATIASIH**

Jalan Swatantra IV No. 2 Bekasi Kode Pos 17423 Telp. (021) 8213800 Fax. (021) 8213800

JATIASIH

Jatiasih, 19 November 2010

Nomor : 800/ 900/Kc.Jta/XI/2010  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ka. Biro Administrasi  
Universitas Negeri Jakarta  
di-  
**JAKARTA**

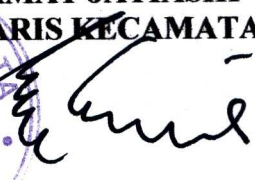
Berdasarkan surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Nomor : 4999/H39.12/PL/2010 tanggal 4 November 2010 hal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini pada dasarnya kami tidak berkeberatan bahwa :

Nama : **Rizky Agusetiawan**  
Nomor Registrasi : 4115051871  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik

Mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural", lokasi penelitian di wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Demikian agar maklum.

**a.n. CAMAT JATIASIH**  
**SEKRETARIS KECAMATAN**



**Drs. HENRY M SAMOSIR, A. P**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740110 199311 1 001

Tembusan :  
Yth. Lurah Jatirasa



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
KECAMATAN JATIASIH  
KELURAHAN JATIRASA**  
JL. SWATANTRA III NO. 97 TELP. (021) 824 233 12

Kode Pos. 17424

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Reg/162/III/ 2011 .-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SUJITO  
NIP : 19550506 198103 1 005  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d  
Jabatan : Lurah Jatirasa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : RIZKY AGUSETIAWAN  
NIM : 4115051871  
Status : Mahasiswa Program Study S1 Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Jakarta

Telah melaksanakan penelitian di wilayah kami yang dilaksanakan sejak bulan November 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural “ lokasi penelitian di wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatirasa, Maret 2011

**LURAH JATIRASA**

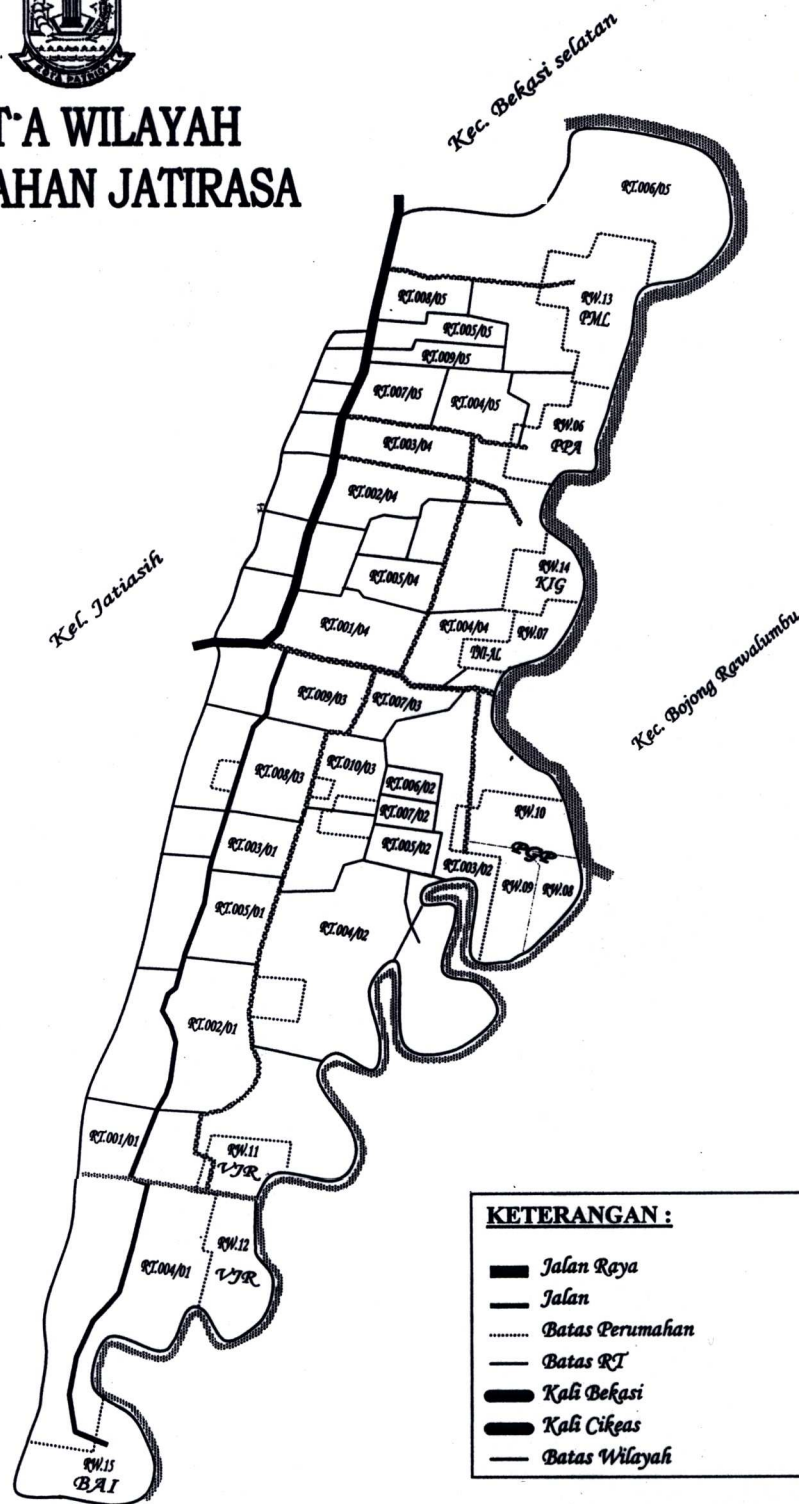
**DRS. H. SUJITO**

Penata Tk. I

NIP. 19550506 198103 1 005



# PETA WILAYAH KELURAHAN JATIRASA



### KETERANGAN :

- Jalan Raya
- Jalan
- Batas Perumahan
- Batas RT
- Kali Bekasi
- Kali Cikgas
- Batas Wilayah



**DOKUMENTASI**

**1) Peneliti Sedang Mewancarai Tokoh Masyarakat Pondok Benda.**



**2) Peneliti Sedang Mewancarai Suku Betawi.**



**3) Peneliti Sedang Mewancarai Etnik Tionghoa.**



**4) Peneliti Sedang Mewancarai Suku Jawa.**



5) Peneliti Sedang Mewancarai Suku Sunda.



6) Peneliti Sedang Mewancarai Tokoh Agama Kristen.



7) Peneliti Sedang Mewancarai Suku Batak.



8) Peneliti Sedang Mewancarai Lurah Jatirasa.



9) Peneliti Sedang Mewancarai Tokoh Agama Islam.



10) Peneliti Sedang Mewancarai Tokoh Kepemudaan.





**RIZKY AGUSETIAWAN.** Lahir di Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 1987. Anak ke-satu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mohamad Ridwan dan Ibu Tati. Tinggal bersama orang tua di Bekasi, tepatnya di Kampung Pondok Benda Rt. 10 / 03 No. 54 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih. Berlatar belakang Pendidikan SD Negeri Jatirasa 1 lulus pada tahun 1999, SMP Negeri 9 Bekasi lulus pada tahun 2002, Tahun 2005 lulus dari SMA Negeri 8 Bekasi. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta di Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi S-1 Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam menyelesaikan tugas akhirnya, penulis mengadakan penelitian di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih dengan judul skripsi " *Budaya Demokrasi Pada Masyarakat Plural* " ( *Suatu Studi Di Wilayah Pondok Benda Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih*). Yang di bimbing oleh Dra. Wuri Handayani, M.Si., dan Drs. Suhadi, M.Si.